DRAFT MODUL KADERISASI KOPRI PKC PMII JAWA BARAT

Hasil Workshop Kaderisasi KOPRI PKC PMII Se-Jawa Barat

Kami tidak meminta untuk diistimewakan atau berusaha merebut kekuasaan tertentu. Yang sebenarnya kami inginkan adalah sederhana, bahwa, mereka mengangkat kaki mereka dari tubuh kami dan membiarkan kami berdiri tegap sama seperti manusia lainnya yang diciptakan Tuhan (Sarah Grimke, 1837)

Bandung, 27 - 29 oktober 2012
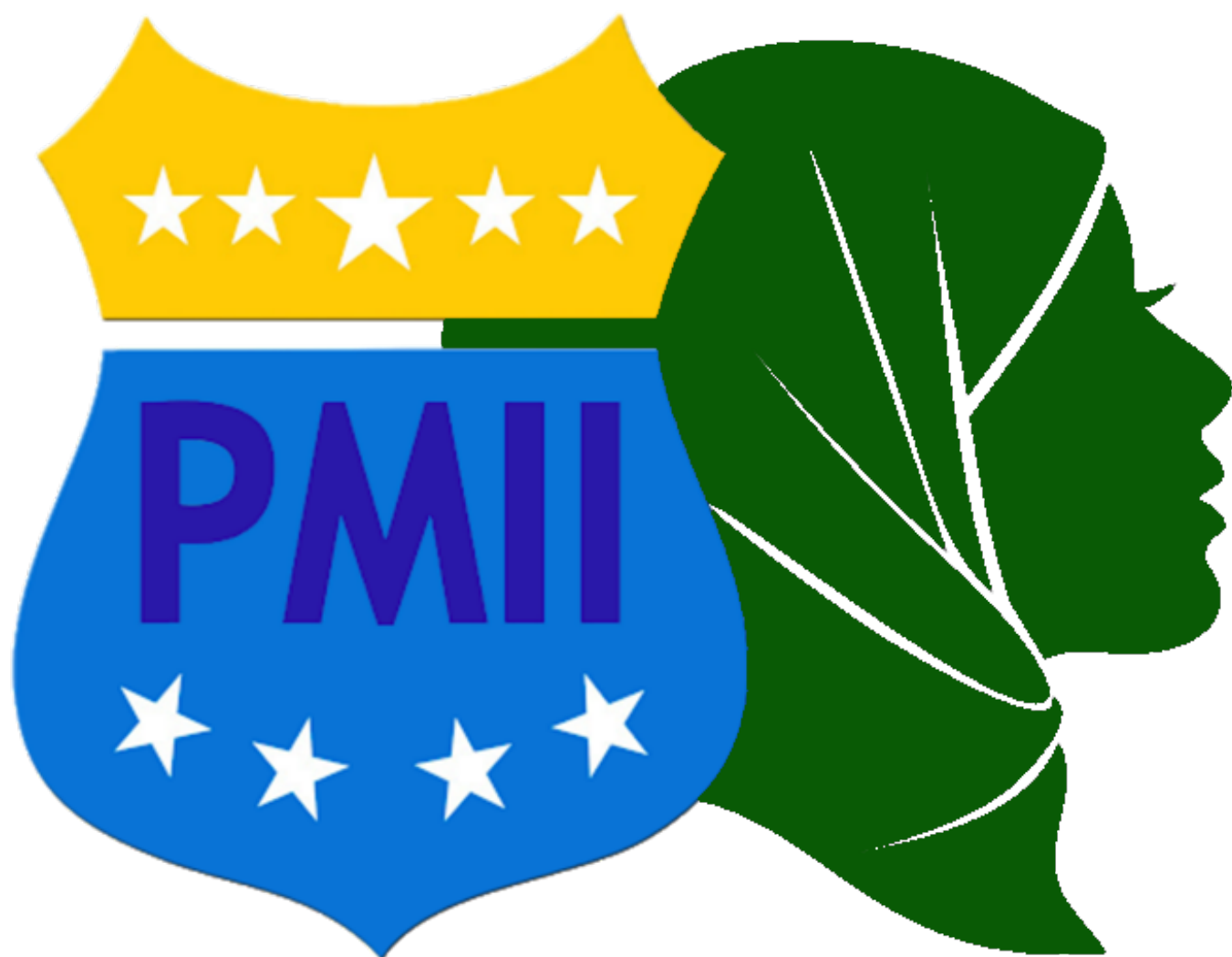
PRAKATA PENYUSUN

"Negeri kita harus berubah situasinya dan harus diperbarui dengan ilmu dan pengetahuan yang sebelumnya tak ada dinegeri ini. Negeri ini harus mengakui keajaiban yang telah dicapai oeh bangsa perancis dalam ilmu dan pengetahuan, banyaknya buku, terbitan dan penelitian akan menghasilkan banyak manfaat"
(syaikh Hasan Al-Aththar)

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Illahi Rabb. Yang telah memberikan begitu banyak nikmat, sehingga kami dapat menyelesaikan modul pengkaderan KOPRI bagi warga PMII umumnya dan kader perempuan PMII khususnya yang terorganisir kedalam KOPRI. Tugas berat ini mampu terselesaikan berkat bantun sahabat-sahabat yang mau berbagi pengalaman dan wawasan berfikir disetiap level kepengurusan.

Kegelisahan bagi kader-kader perempuan PMII paling tidak telah terjawab dengan hadirnya modul pengkader KOPRI ini. Karena menjadi tuntutan dan sadar betul lemahnya organisasi KOPRI dibawah naungan PMII, ketika sistem nilai tidak terbentuk dan terstruktur seperti PMII yang terangkum didalam Multi Level Strategy (MLS).

Penguatan ideologi, dan gerakan harus saling integral untuk terus mendialektikakan wacana dan sosial. Dan menjadi tuntutan bagi KOPRI untuk senantiasa mampu berdiri dan menempatkan diri disetiap perkembangan dan perubahan zaman. Agar KOPRI mampu bertahan dan terus melakukan dinamisasi disetiap level.

Sebagai langkah penguatan basis gerakan, segala upaya mesti dilakukan baik melalui pendekatan politik, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya maupun pendekatan agama. Untuk konteks warga pergerakan, pendekatan ini harus mampu dikuasai terutama pendekatan terakhir ini dipandang efektif karena berbanding lurus dengan potret sosio-kultural masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang beragama.

Sangat disayangkan, ketika PMII berusaha memaksimalkan kader-kader perempuan PMII untuk mampu bersaing dan mandiri dengan membentuk Badan Semi Otonom yaitu KOPRI. Tetapi, keberadaannya tidak dapat dirasakan oleh kader-kader PMII seluruhnya baik itu laki-laki maupun perempuan apalagi masyarakat yang lebih luas. Hanya sia-sia lah keberadaan KOPRI, seperti "Hidup segan mati tak mau".

Untuk itulah, pentingnya kehadiran modul kaderisasi ini ditengah-tengah kegelisahan warga pergerakan KOPRI. Bukan hanya sebagai ceremonial semata atau hanya memenuhi ritual kegiatan organisasi. Tetapi menjadi pemandu bagi kader-kader perempuan PMII untuk senantiasa memperkuat basis pengetahuan, dan basis gerakan.

Dan modul ini, belum seutuhnya sempurna. Karena masih banyak kekurangan dan perlu pendiskusian yang lebih mendalam. Maka dari itu, kepada seluruh basis KOPRI untuk betul-betul memahami dan mempelajari modul ini. Yang pasti modul ini tidak bermaksud menyeragamkan pola kaderisasi, karena kami sadar betul setiap daerah dan tempat memiliki adat, budaya, dan karakteristik lokal yang tidak bisa dihapuskan. Tetapi menjadi integral dengan pola pengkaderan KOPRI ini.

Semoga modul ini mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan basis dibawah, dan dapat diselaraskan dengan karakteristik disetiap level kepengurusan KOPRI disetiap daerah. Dan semoga modul ini mampu bersanding dengan modul pengkaderan di PMII sehingga pengkaderan PMII akan lebih kaya dan dinamis.

Kami sadar, penyusunan modul ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, berbagai saran, kritik yang membangun masih sangat kami perlukan dari warga pergerakan Jawa Barat khususnya dan warga pergerakan lainnya. dan kami sangat mengharapkan sahabat-sahabat memberi kesempatan kepada kami untuk duduk bersama dalam membahas modul pengkaderan KOPRI ini disetiap cabang didaerah masing-masing agar terjalin dinamisasi pemikiran dan share gagasan diruang dan waktu yang lebih nyata.

Bandung, Desember 2012

Tim penyusun

DAFTAR ISI

BAB I
LANDASAN FILOSOFIS KADERISASI

Kaderisasi yang baik adalah kaderisasi yang tidak melepaskan diri dari realita sosial atau perkembangan zamannya. Dalam konteks kekinian, kaderisasi harus menjadi patokan utama dalam pembentukan watak dan peradaban baru, dimana zaman modern ini manusia dituntut untuk terampil dan bersaing disegala aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Hari ini PMII berada ditengah-tengah arus modernisme yang semakin maju dengan pesat maka PMII pun harus mampu bertahan dan lebih maju mengikuti arus modernisme. Maka, pola kaderisasi yang harus dibangun sesuai dengan kondisi sosial sekarang ini. Cita-cita mencetak kader yang *Ulul Albab* menjadi prioritas utama kader-kader PMII, baik laki-laki maupun perempuan.

Kaderisasi yang produktif dan terarah merupakan konsep yang harus menjadi pedoman utama dalam proses pengkaderan. Penguatan kader secara intelekutal, skill, dan kemandirian menjadi tolak ukur keberhasilan dalam proses kaderisasi. Selain itu, tiga pilar dalam kaderisasi yang tidak akan pernah bisa dilepaskan menjadi satu kesatuan yang saling terikat yaitu, keimanan, ketrampilan, dan pengetahuan. Kombinasi ini menjadi tanggung jawab organisasi yang harus menyegerakan melakukan pengkaderan sesuai dengan aturan main organisasi, dan menjadi ghiroh gerakan dalam proses pengkaderan.

Setiap masa atau zaman pasti memiliki pengalaman dan kondisi yang berbeda. Maka, diperlukan formula-formula baru untuk selalu menyegarkan system pengkaderan yang lebih baik. Keberhasilan seorang kader tergantung bagaimana proses pengkaderan itu berlangsung. Jangan pernah berharap lebih organisasi akan menghasilkan kader-kader sesuai dengan yang dicita-citakan bersama, jika proses pengkaderan hanya sebatas ceremonial semata. Maka kita hanya tinggal menunggu kehancuran dari organisasi itu sendiri.

Konsep pengkaderan yang dilakukan oleh PMII saat ini mengacu kepada Multi Level Strategi gerakan. KOPRI yang merupakan bagian dari PMII yang *concern* pada kaderisasi perempuan yang ada di PMII, oleh karena itu konsep pengkaderan yang ada di PMII harus tertuju kepada seluruh kader tanpa memandang bulu baik berdasarkan jenis kelamin, ras, dan status sosial lainnya.

PMII yang merupakan organisasi kader, secara otomatis KOPRI pun termasuk didalamnya. Karena KOPRI merupakan bagian dari PMII sehingga memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal pembentukan karakter kader-kader PMII baik laki-laki maupun perempuan. Pada hakekatnya kaderisasi di PMII sudah semaksimal mungkin dalam proses pembinaan terhadap anggota PMII. Namun, menjadi sebuah fenomena ketika kaderisasi yang dijalankan secara beriringan, tetapi kuantitas dan kualitas kader perempuan PMII jauh dibawah kader-kader PMII laki-laki.

Maka, perlu adanya refleksi bersama untuk peningatan kualitas kader baik laki-laki maupun perempuan. Untuk mensinergikan arah gerak kader-kader PMII secara keseluruhan bukan hanya ilusi semata.

A. KONDISI PEREMPUAN

Sejalan dengan perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara dilingkungan dunia internasional, maka suatu negara dalam mempertahankan eksistensi atau kelangsungan hidupnya memerlukan perjuangan seluruh bangsa untuk mencapai atau mempertahankan kelestarian teritorialitas atau kedaulatan teritorialnya. Menyadari adanya kompleksistas permasalahan, baik isu mengenai tapal batas (border), keamanan nasional *(national security)* atau keamanan manusia (human security) perlu adanya satu pemahaman wawasan nusantara di dalam menentukan suatu kebijakan.

Guna mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan tersebut di atas dan menghadapi pengaruh perkembangan lingkungan strategis yang diwarnai arus globalisasi dan gelombang reformasi, maka diperlukan suatu rumusan kebijakan/strategi geopolitik Indonesia yang handal.

Kondisi ini juga membawa dampak yang sangat besar bagi perempuan sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. Kondisi perempuan masih sangat diperhitungkan dalam segala aspek, sosial, budaya, dan politik. Pembatasan ruang dan waktu perempuan menjadi asset yang sangat berharga, dimana posisi perempuan masih didomestifikasikan baik dalam ruang publik maupun privat. Manusia berjenis kelamin perempuan tidak mampu menentukan hidupnya sendiri, anggapan-anggapan secara umum tentang perempuan yang lemah, lembut, patuh, penurut, penyabar, penyayang, dan justifikasi lainnya. Yang membuat perempuan terlemahkan secara sistematis ditambah prasangka ini telah mendapat penguatan secara struktur masyarakat yang terwujud dalam bentuk kebiasaan dan menjadi norma-norma yang berlaku saat ini.

Kondisi perempuan akan kami bahas dalam beberapa situasi mulai global dan nasional. Potret perempuan saat ini juga tidak lepas dari geo eko-pol internasional yang membuat posisi perempuan menjadi terpinggirkan bahkan menjadi komodity.

1. Situasi Global

Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah menjadikan wilayah kedaulatan suatu negara menjadi lebih abstrak, sehingga mudah ditembus oleh para pelaku atau aktor internasional. Karena itu, kerawanan penetrasi asing terhadap wilayah yurisdiksi nasional yang melampaui batas kedaulatan negara, hampir dipastikan mengandung resiko ancaman keamanan yang bersifat transnasional, antara lain seperti kejahatan lintas negara, masalah kerusakan lingkungan, imigrasi gelap, pembajakan dan perompakan di laut, penangkapan ikan ilegal, terorisme internasional, penyelundupan senjata maupun perdagangan anak-anak dan perempuan.

Dan kondisi ini membuat Negara-negara maju lebih mudah mengakses dan masuk kenegara-negara berkembang, seperti Indonesia. Indonesia termasuk Negara miskin yang kemudian dieufinisme-kan menjadi Negara berkembang. Dengan luas dan letak yang strategis membuat Negara-negara maju merauk keuntungan yang sebesar-besarnya dinegeri ini dengan cara meminjam uang kenegara-negara maju dan dengan penanaman modal asing. Didukung oleh pilar-pilar badan dunia seperti: World Bank, IMF, WTO, dan perusahaan-perusahaan transnasional lainnya.

Dalam konteks global, gerakan kaum perempuan dimulai pada tahun 1980-an saat perempuan masih buta huruf, kemiskinan, dan tidak memiliki keahlian. Berawal dari hal itu, gerakan perempuan periode pertama lebih menitikberatkan pada perubahan social bagi perempuan itu sendiri. Gerakan perempuan generasi pertama ini mengalami perubahan ketika industrialisasi pada abad ke-19 semakin memarjinalkan peran perempuan dalam lingkungan sosial. Peran perempuan kelas menengah semakin menyadari ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Lambat laun, gerakan ini mengkristal menjadi gerakan feminis di seluruh dunia.

Dalam konteks ekonomi politik kekinian, peremuan masih menjadi barang laku pemapanan kapitalisasi. Hegemoni kapital yang dilancarkan melalui iklan-iklan komersil membuat penindasan secara terselubung terhadap perempaun semakin sukses. Permasalahan yang terjadi bukan pada posisi perempuan sebagai bintang iklan pasar global, tetapi lebih dari itu, perempuan digiring untuk menjadi alat dalam melancarkan hegemoni global itu sendiri. Secara langsung atau tidak langsung, fenomena ini mempertanyakan posisi perempuan itu sendiri dalam konteks globalisasi, terutama perang pasar bebas itu sendiri.

Dalam tatanan geo politik, ruang-ruang regional-nasional kembali direbut oleh kapitalisme. Disadari atau tidak, ruang sebagai bagian dari wilayah kekuasaan turut mempengaruhi ruang gerak bangsa dan negara. Dengan alasan demikian, dapat dipahami jika ada pencaplokan batas wilayah NKRI oleh Negara asing sama halnya dengan menginjak-injak nasionalisme. Semakin besar wilayah, semakin besar ruang gerak. Begitu pula dengan gerakan feminis, semakin luas kemerdekaan berserikat dan berkumpul sebagai bagian dari geopol gerakan, semakin besar ruang gerak untuk mengimplementasikan gerakan kesetaraan gender.

Akan tetapi, fenomena tersebut terbantahkan ketika kepentingan global merangsek masuk melalui jalur media informasi dan komunikasi. Globalisasi yang membiaskan geografis bangsa, semakin membuat kelompok dominan bergerak bebas melancarkan kepentingannya. Dalam hal ini, seketat apa pun pertahanan keamanan di tapal batas negara tak berarti apa-apa jika kaum pemodal sebagai pengendal kekuatan ekonomi mampu mengendalikan media. Dalam hal inilah pertarungan ruang kosong terjadi antara nasionalisme dengan hegemoni global.

Kaitannya dengan gerakan feminis, posisi dirinya kembali ditantang untuk melakukan *counter discourse* terhadap perang media itu sendiri. Posisi perempuan sebagai alat komoditi kapitalis dengan pengemasan lembut dan pragmatis di berbagai media dapat lebih diterima khalayak dibandingkan dengan metode konvensional gerakan gender melalui gerakan social. Dampaknya, penerimaan khalayak terhadap produk media yang secara umum memakai perempuan sebagai alat sama halnya dengan memapankan penindasan terhadap perempuan sebagai komoditas pasar. Secara tidak langsung, ruang gerak gerakan perempuan dalam konteks nasional ini kembali diacak-acak oleh kepentingan kapital.

2. Situasi Nasional

Sejarah bangsa Indonesia yang sangat panjang dan sangat menyakitkan, penjajahan Belanda di Indonesia. Dan pada masa itu pula zaman feodalisme Pribumi terlahir, dimana sistem tanam paksa terjadi kepada perempuan, anak-anak, dan laki-laki digiring untuk mengolah ladang-ladang mereka. Bahkan kadang terjadi perempuan-perempuan hamil yang melahirkan anak saat bekerja keras diladang. Kesengsaraan tanam paksa dengan datangnya pengganti-penggantinya yang partikelir, yang tetap bersifat monopoli, dengan perlindungan kuat dari pemerintah Hindia Belanda, dan ini akan memunculkan penindasan-penindasan yang lebih kejam lagi diatas pundak pribumi.

Disini kita lihat suatu bangsa yang tidak secara undang-undang hidup dalam perbudakan tapi secara kenyataan. Ketakutan kepada kepala-kepalanya telah merasuk kedalam jiwa mereka: kepala-kepala ini pula takut kepada kaum penjajah. Bersamaan dengan batas sejarah pribumi ini mulai berakhir pula penjajahan kuno belanda atas Indonesia dan memasuki sejarah penjajahan baru; imperialism modern.

Hindia Belanda tidak lagi menjadi urusan atau hak milik Raja pribadi, tetapi mendapat undang-undang ketatanegaraan sendiri. Tanampaksa, lambat-lambat dilepas dan dihapuskan. Dengan terbitnya Max havelaar karangan Multatuli, bukan saja pandangannya terhadap tanampaksa berubah sama sekali, bahkan juga mempelopori diakhirinya Cultuurstelsel. Mulai tahun 70-an abad ke-19 itu tanampaksa itu dihapus sedikt-demi sedikit. Dengan dilepaskannya Tanampaksa, banyak perkebunan jatuh ketangan partekelir, dan dengan peraturan modern, perusahaan-perusahaan ini menjadi bibit-bibit kapitalisme. Petani-petani yang ditarik dari tanahnya masing-masing, dengan tiadanya tanampaksa, hidup gentayangan tanpa penghasilan. Dan dengan demikian timbullah kelas proletar buat pertama kalinya di Indonesia. Mereka tidak lagi hidup dari tanah garapannya, juga tidak dari kesetiaannya pada golongan feodal, tidak dari tanggungjawab kampungnya, tidak dari pemerasan, tidak dari perdagangan, tetapi dari menjual tenaganya.

Gerobak-gerobak kerbau dan sapi tidak lagi memenuhi syarat bagi kapitalisme modern. melainkan Tenaga, keringat, bahkan tubuh perempuan sekalipun, dijadikan sebagai alat produksi bagi mereka.

Situasi global sangat mempengaruhi laju pertumbuhan dan kemajuan nasional. Berbagai permasalahan dan menjadi topic hangat dinegeri ini dan dampaknya bagi perempuan diantaranya:

- *Proses politik dan demokratisasi*. Akhir tahun 2004 juga ditandai dengan keberhasilan bangsa Indonesia menyelenggarakan Pemilu dengan sistem pemilihan langsung. Proses Pemilu yang sangat transparan merupakan kunci keberhasilan KPU menyelenggarakan pesta demokrasi ini. Sesuai amanat Undang-undang, maka posisi Presiden menjadi sangat kuat sehingga tidak mudah untuk dijatuhkan Parlemen. Di sisi lain, DPR yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, menjadi kekuatan penyeimbang yang perannya sangat penting selaku pengawas dan pengontrol setiap kebijakan Pemerintah. Tapi, proses ini belum mampu menjawab secara keseluruhan. Faktanya quota 30% bagi perempuan menduduki kursi legaslatif juga belum mampu mencapai itu ditambah masih sangat minimnya perempuan-perempuan yang terjun keranah politik. Disisi lain, kebijakan-kebijakan yang diskriminatif bagi perempuan masih marak dengan munculnya perda-perda syari'ah, penangkapan dan kekerasa terhadap perempuan pun tak terhindarkan, seperti pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan aceh oleh polisi syari'ah.
- *Isu separatisme*. Tiga kasus besar gerakan separatis politik dan bersenjata yang kini mengarah pada upaya pemisahan diri dari NKRI yakni, gerakan separatis bersenjata di Aceh, Gerakan Aceh Merdeka/GAM (yang telah sepakat untuk mengakui dan bergabung kembali dalam NKRI), kelompok separatis politik (KSP) dan kelompok separatis bersenjata (KSB/TPN) yang berinduk di bawah OPM di Papua, serta upaya pembentukan kembali Republik Maluku Selatan (RMS) melalui pembentukan organisasi RMS gaya baru yakni Forum Kedaulatan Maluku (FKM). Keamanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi sangat ekstra karena dalam kondisi ini perempuan dan anak lah yang menjadi korban kebrutalan para separatism dan premanisme.
- *Terorisme dan gerakan kelompok radikal*. Meski ruang gerak kelompok teroris ini sudah semakin sempit karena langkah-Iangkah yang diambil aparat keamanan, namun realitas bahwa mereka masih eksis menunjukkan bahwa permasalahan terorisme bukan masalah sederhana. Permasalahan terorisme yang dilatarbelakangi belum tuntasnya penyelesaian masalah politik di Timur Tengah, menjadi semakin rumit karena telah berinteraksi dengan isu agama. Dangkalnya memahami konteks keagamaan, yang menyebabkan banyaknya pihak-pihak yang dirugikan termasuk perempuan. Konteks sosial selalu dikaitkan dengan konteks ibadah, yang membuat perempuan masih didomestifikasikan oleh konstruk masyarakat. Berbagai kebijakan-kebijakan yang dibuat mengatasnamakan demi kebaikan perempuan merupakan cerminan dari budaya patriarki yang menghambat kemajuan perempuan. selain itu, patriarki juga tercermin dalam bentuk fatwa-fatwa agama yang dikeluarkan MUI

maupun kelompok fundamentalis lainnya. Sedikit banyaknya peran pemuka agama dan kelomok fundamentalis masih memiliki pengaruh dikalangan masyarakat yang memperkuat budaya patriarki.

- *Aksi kekerasan dan konflik komunal*. Meski langkah-langkah penegakkan hukum telah diambil, namun diperkirakan kasus-kasus kekerasan baik kekerasan terhadap perempuan dan konflik-konflik komunal masih akan terjadi secara insidentil. Penanganannya diawali dengan pendekatan pembangunan kebangsaan, tanpa mengabaikan keberagaman budaya, dan pada saat yang sama dilaksanakan pembangunan kesejahteraan. Meskipun upaya peningkatan kualitas proses politik dalam rangka normalisasi dan stabilisasi kehidupan masyarakat disejumlah daerah konflik dan rawan konflik relatif berjalan Iambat, tetapi perbaikan struktur dan proses politik menuju resolusi konflik secara bertahap dapat berjalan dengan baik.
- *Isu keamanan teritorial*, perbatasan dan pulau terluar. Dalam isu keamanan perbatasan baik perbatasan darat maupun laut, terdapat sejumlah permasalahan tapal batas wilayah yang harus segera diatasi. Isu keamanan perbatasan tersebut, juga meliputi adanya kondisi pulau-pulau terluar yang berada dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga yang sesungguhnya berpotensi dapat lepas dari NKRI bila tidak dapat dipelihara dan dijaga dengan baik. Isu ini bukan menjadi isu pemerintah semata tetapi menjadi isu bersama seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam mempertahankan dan menjaga keamanan negara.

Permasalahan-permasalahan diatas sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan kesejahteraan rakyat khususnya kondisi perempuan. Seiring dengan isu diatas, kebijakan neo-liberal yang diterapkan oleh pemerintah semakin memiskinkan rakyat termasuk perempuan didalamnya, seperti UU PMA, diterapkannya ACFTA, penetapan upah riil buruh yang semakin rendah, dan serangkaian kebijakan lain yang merugikan. Kebijakan neo-liberal tersebut dibutuhkan oleh para pemilik modal untuk meluaskan pasar, memenuhi kebutuhan akan Sumber Daya Alam dan tenaga kerja murah melimpah. Dalam hal ini, perempuan Indonesia potensi tenaga kerja murah yang bisa leluasa dihisap untuk kepentingan pemodal, sekaligus merupakan sasaran konsumen yang potensial seperti halnya tubuh perempuan yang semakin dijadikan komoditi bagi kapitalisme. Tubuh perempuan, dari ujung kaki sampai ujung rambut tak lepas dari eksploitasi dalam wujud mitos kecantikan.

Disisi lain, krisis kapitalaisme yang kini menyerang jantung kapitalisme yaitu Amerika Serikat, telah memberi dampak luar biasa bagi perempuan, terutama perempuan di negara berkembang seperti Indonesia. Kehancuran tenaga produktif perempuan pun tak terhindarkan, hingga tahun 2010 saja 6,5 juta perempuan Indonesia masih buta huruf. Belum lagi, angka kematian ibu yang terus merangkak naik dan menjadi Indonesia sebagai negara dengan angka kematian ibu tertinggi di Asia, dimana 307 ibu meninggal per

100.000 kelahiran. Sebuah gambaran riil hancurnya tenaga produktif perempuan akibat mahalnya fasilitas pendidikan, kesehatan dan kemiskinan yang merajalela.

B. AWAL GERAKAN PEREMPUAN DIDUNIA

Awal gerakan perempuan di dunia tercatat di tahun 1800-an. Ketika itu para perempuan menganggap ketertinggalan mereka disebabkan oleh kebanyakan perempuan masih buta huruf, miskin dan tidak memiliki keahlian. Karenanya gerakan perempuan awal ini lebih mengedepankan perubahan sistem sosial dimana perempuan diperbolehkan ikut memilih dalam pemilu. Tokoh-tokoh perempuan ketika itu antara lain **Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton** dan **Marry Wollstonecraft**. Bertahun-tahun mereka berjuang, turun jalan dan 200 aktivis perempuan sempat ditahan, ketika itu.

Seratus tahun kemudian, perempuan-perempuan kelas menengah abad industrialisasi mulai menyadari kurangnya peran mereka di masyarakat. Mereka mulai keluar rumah dan mengamati banyaknya ketimpangan sosial dengan korban para perempuan. Pada saat itu benbih-benih feminsime mulai muncul, meski dibutuhkan seratus tahun lagi untuk menghadirkan seorang feminis yang dapat menulis secara teorityis tentang persoalan perempuan. Adalah Simone de Beauvoir, seorang filsuf Perancis yang menghasilkan karya pertama berjudul *The Second Sex*. Dua puluh tahun setelah kemunculan buku itu, pergerakan perempuan barat mengalami kemajuan yang pesat. Persoalan ketidakadilan seperti upah yang tidak adil, cuti haid, aborsi hingga kekerasan mulai didiskusikan secara terbuka. Pergerakan perempuan baik di tahun 1800-an maupun 1970-an telah membawa dampak luar biasa dalam kehidupan sehari-hari perempuan. Tetapi bukan berarti perjuangan perempuan berhenti sampai di situ. Wacana-wacana baru terus bermunculan hingga kini. Perjuangan perempuan adalah perjuangan tersulit dan terlama, berbeda dengan perjuangan kemerdekaan atau rasial. Musuh perempuan seringkali tidak berbentuk dan bersembunyi dalam kamar-kamar pribadi. Karenya perjuangan kesetraan perempuan tetap akan bergulir sampai kami berdiri tegap seperti manusia lainnya yang diciptakan Tuhan.

1. Aliran-Aliran Gerakan Perempuan

Gerakan perempuan tidak pernah mengalami keseragaman di muka bumi ini. Antara satu negara dan satu budaya dengan negara dan budaya lain, memiliki pola yang kadang berbeda, bahkan ambivalen. Feminisme sebagai sebuah isme dalam perjuangan gerakan perempuan juga mengalami interpretasi dan penekanan yang berbeda di beberapa tempat.

Ide atau gagasan para feminis yang berbeda di tiap negara ini misalnya tampak pada para feminis Itali yang justru memutuskan diri untuk menjadi oposan dari pendefinisian kata feminsime yang berkembang di barat pada umumnya. Mereka tidak terlalu setuju dengan konsep yang mengatakan bahwa dengan membuka akses seluas-luasnya bagi perempuan di ranah publik, akan berdampak timbulnya kesetaraan. Para feminis Itali lebih

banyak mengupayakan pelayanan-pelayanan sosial dan hak-hak perempuan sebagai ibu, istri dan pekerja. Mereka memiliki UDI (*Unione DonneItaliane*) yang setara dan sebesar NOW (*National Organization for Women*) di Amerika Serikat. Pola penekanan perjuangan feminis Itali ini mengingatkan kita pada gaya perjuangan perempuan di banom-banom NU di Indonesia.

Hal yang sedikit berbeda terjadi di Perancis. Umumnya feminis di sana menolak dijuluki sebagai feminis. Para perempuan yang tergabung dalam *Mouvment de liberation des femmes* ini lebih berbasis pada psikoanalisa dan kritik sosial. Di Inggris pun tokoh-tokoh seperti **Juliat Mitcell** dan **Ann Oakley** termasuk menentang klaim-klaim biologis yang dilontarkan para feminis radikal dan liberal yang menjadi tren di tahun 60-an. Bagi mereka, yang bisa menjadi pemersatu kaum perempuan adalah konstruksi sosial bukan semata kodrat biologinya.

Di dunia Arab, istilah feminisme dan feminis tertolak lebih karena faktor *image* barat yang melekat pada istilah tersebut. Pejuang feminis di sana menyiasati masalah ini dengan menggunakan istilah yang lebih Arab atau Islam seperti *Nisa'i* atau *Nisaism*.

Meski kemudian definisi feminisme banyak mengalami pergeseran, namun rata-rata feminis tetap melihat bahwa setiap konsep, entah itu dari kubu liberal, radikal maupun sosialis tetap beraliansi secara subordinat terhadap ideologi politik tertentu. Dan konflik yang terjadi di antara feminis itu sendiri sering disebabkan diksi politik konvensional melawan yang moderat. Misalnya konsep otonomi dari kubu feminis radikal berkaitan dengan gerakan antikolonial, sementara kubu feminis liberal menekankan pada pentingnya memperjuangkan kesetaraan hak-hak perempuan dalam kerangka bermasyarakat dan berpolitik yang plural. Inilah mengapa feminis selalu bercampur dengan tradisi politik yang dominan di suatu masa.

Hingga bila dipilah-pilah berdasarkan tradisi politik yang berkembang, maka aliran-aliran dalam femninisme dapat dibedakan ke dalam kubu-kubu sebagai berikut.

a. Feminisme radikal
b. Feminisme liberal.
   (Keduanya lebih mengedepankan klaim-klaim biologis, dan dikenal sebagai kelompok feminis-ideologis).
c. Feminisme sosialis atau feminisme Marxis: perempuan lebih dipandang dari sudut teori kelas, sebagai kelas masyarakat yang tertindas.
d. Feminisme ras atau feminisme etnis: yang lebih mengedepankan persoalan pembedaan perlakuan terhadap perempuan kulit berwarna.
   Diluar kecenderungan tradisi politik diatas, berkembang pula feminisme karena pendekatan teori dan kecenderungan kelompok sosial tertentu, seperti:
e. Feminisme psikoanalisis, dan
f. Feminisme lesbian.

Dari semua aliran yang ada di atas, masih berpotensi untuk berkembang menjadi beberapa beberapa sempalan aliran lain, dan seperti yang telah diungkapkan di atas, wacana feminisme dan gerakan perempuan akan terus berkembang seiring dengan ragam perkembangan kelas masyarakat yang memperjuangkannya, kecenderungan kondisi sosial politik, serta kepentingan yang membingkai perjuangan tersebut.

Namun ada dua kategori kecenderungan besar yang dapat disebutkan dan cukup dikenal dan berpengaruh hingga sekarang, yakni: fenimisme ortodoks dan postfeminisme.

a. Feminisme ortodoks

Atau dikenal sebagai feminisme gelombang kedua, berkarakter sangat fanatik dan ortodoks dengan penjelasan-penjelasan wacana patriarkhal. Kaum feminis garis keras ini begitu yakin bahwa segala sesuatu yang menyusahkan dan menindas perempuan berhubungan dengan patrarkhal, hingga segala argumen hanya bertumpu pada penjelasan patrarkhal. **Camille Paglia** seorang profesor studi kemanusiaan dari Universitas Philadelphia mengkritik sikap feminis ortodoks sebagai kelompok yang selalu menganggap perempuan sebagai korban.

Bagi kalangan feminis ortodoks feminisme diartikan sebagai identifikasi dengan keinginan kesetaraan gender lewat perjuangan historis yang dicapai dengan advokasi melalui kegiatan politik. Feminisme memperlihatkan adanya perbedaan antara femnin dan maskulin yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Sedangkan jantan (*male)* dan betina (*female*) merupakan aspek biologis yang menentukan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perbedaan linguistik ini bagi feminis ortodoks dianggap sebagai sesuatu yang ideologis. Sedangkan bagi kalangan postfeminisme dianggap sebagai masalah.

Contoh dalam penanganan kasus pemerkosaan atau kekerasan terhadap perempuan misalnya, mereka akan mengandalkan argumen-argumen kelemahan perempuan, korban yang harus selalu duilindungi dan selalu mengalami ketidakadilan dari masyarakat yang patriarkhal. Argumen semacam ini terkesan manipulatif dan tidak bertanggung jawab.

Kalangan ini banyak diwakili oleh *femnistes revolusionares* (FR) yang berdiri sejak tahun 1970 yang merupakan bagian dari *Movement de Libaration des Femmes* (MLF) atau gerakan pembebasan perempuan. Kelompok FR ini tidak menggunakan pendekatan psikoanalisa dan sangat mengagungkan kesetaraan serta rata-rata didukung kalangan lesbian.

Teori dasar kelompok FR adalah menentang determinisme biologis, yaitu perempuan tersubordinasi dengan norma-norma maskulin, karena haluan ini (determinsime biologis) menurut mereka merujuk pada pandangan tradisional esensialisme. Teori ini (tradisonal esensial) menekankan bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan adalah *fixed* atau kodrat yang tidak dapat berubah. Sementara menurut FR perbedaan terjadi karena masyarakat patriarkhi menganggap perempuan sebagai "*the other*" dalam tataran biologis dan psikis.

b. Postfemnisme

Kecenderungan feminisme ortodoks yang selalu melihat perempuan sebagai makhluk lemah tak berdaya dan korban laki-laki ini, tidak dapat diterima oleh perempuan-perempuan muda tahun 1900-an dan 2000 di beberapa negara maju. Retorika feminisme yang melekat pada “ibu-ibu” mereka terutama di tahun 70-an di daratan Amerika dan Inggris telah membuat generasi muda “bosan” dengan femnisme. Feminisme menjadi ukuran moralistik dan politik seseorang dan menjadi pergerakan kaum histeris, serta sangat mudah untuk menuduh dan melabeling seseorang dengan atribut “tidak femnis”. Kelompok inilah yang kemudian memperjuangkan postfeminisme.

Bahkan embrio kelompok ini sudah mulai muncul di tahun 1968 di Paris, tepatnya ketika mereka (kelompok anggota po et psych/ *politique et psychoanalyse*) turun ke jalan pada Hari Perempuan tanggal 8 Maret 1968 dan meneriakkan : *Down with feminism*. Sejak tahun 1960 kelompok postfeminis ini telah berusaha mendekonstruksi wacana patriarkhal terutama wacana yang dikembangkan oleh *feministes revolutionnaires* (FR).

Bagi kelompok *po et psych*, posisi FR yang memakai semangat humanisme, jatuh lagi pada esensialisme yang mempunyai kategori fixed. Oleh karenanya po et psych mengadopsi teori psikoanalisa Freud yang mencoba menggunakan metode dekonstruksi dalam melihat teks-teks ketertindasan perempuan. Selain itu kelompok ini tidak menekankan pada kesetaraan (*equality*) seperti kelompok FR, yaitu identitas dan gender, tetapi lebih menekankan pada perbedaan (*diffrence*). Di sini dapat dipahami bila postfeminisme membawa paradigma baru dalam feminisme, dari perdebetan seputar kesetaraan ke perdebatan seputar perbedaan.

Bagaimana perkembangan aliran feminisme di Indonesia? Dapat dikatakan Indoensia masih mengalami euforia feminisme. Dan seperti euforia lainnya, terkesan masih norak dengan situasi yang baru, Feminis di Indonesia masih cenderung reaktif seperti feminis di barat di era 60-an dan 70-an.

2. Gerakan Perempuan Di Indonesia

Ketika masa prakemerdekaan, gerakan perempuan di Indonesia ditandai dengan munculnya beberapa tokoh perempuan yang rata-rata berasal dari kalangan atas, seperti: **Kartini, Dewi Sartika, Cut Nya’ Dien** dan lain-lain. Mereka berjuang mereaksi kondisi perempuan di lingkungannya. Perlu dipahami bila model gerakan **Dewi Sartika** dan **Kartini** lebih ke pendidikan dan itu pun baru upaya melek huruf dan mempersiapkan perempuan sebagai calon ibu yang terampil, karena baru sebatas itulah yang memungkinkan untuk dilakukan di masa itu. Sementara **Cut Nya’ Dien** yang hidup di lingkungan yang tidak sepatriarkhi Jawa, telah menunjukkan kesetaraan dalam perjuangan fisik tanpa batasan gender. Apapun, mereka adalah peletak dasar perjuangan perempuan kini.

Di masa kemerdekaan dan masa Orde Lama, gerakan perempuan terbilang cukup dinamis dan memiliki bergaining cukup tinggi. Dan kondisi semacam ini mulai tumbang sejak Orde Baru berkuasa. Bahkan mungkin perlu dipertanyakan: adakah gerakan perempuan di masa rejim orde baru? Bila mengunakan definisi tradisonal di mana gerakan perempuan diharuskan berbasis massa, maka sulit dikatakan ada gerakan perempuan ketika itu. Apalagi bila definisi tradisonal ini dikaitkan dengan batasan ala **Alvarez** yang memandang gerakan perempuan sebagai sebagai sebuah gerakan sosial dan politik dengan anggota sebagian besar perempuan yang memperjuangkan keadilan gender. Dan **Alvarez** tidak mengikutkan organisasi perempuan milik pemerintah atau organisasi perempuan milik parpol serta organisasi perempuan di bawah payung organisasi lain dalam definisinya ini.

Namun definisi baru gerakan perempuan tidak seketat ini, hingga dapat disimpulkan di masa Orba pun telah muncul gerakan perempuan. Salah satu buktinya adalah munculnya diskursus seputar penggunaan istilah perempuan untuk menggantikan istilah wanita.

Gerakan perempuan di masa rejim otoriter Orba muncul sebagai hasil dari interaksi antara faktor-faktor politik makro dan mikro. Faktor-faktor politik makro berhubungan dengan politik gender orba dan proses demokratisasi yang semakin menguat di akhir tahun 80-an. Sedangkan faktor politik mikro berkaitan dengan wacana tentang perempuan yang mengkerangkakan perspektif gerakan perempuan masa pemerintahan Orba. Wacana-wacana ini termasuk pendekatan *Women in Devolopment* (WID) yang telah mendominasi politik gender Orba sejak tahun 70-am, juga wacana femnisme yang dikenal oleh kalangan terbatas (kampus/akademinis) dan ornop.

a. Politik Gender dari Rezim Orba

Sebagaimana negara-negara berkembang lainnya, pemerintahan Orba diidentikkan dengan peratutaran yang otoriter yang tersentralisasi dari militer dan tidak dikutsertakannya partisipasi efektif partai-partai politik dalam proses pembuatan keputusan. **Anders Uhlin** berpendapat bahwa selain dominasi negara atas masyarakat sipil, struktur ekonomi dan politik global, struktur kelas, pembelahan atas dasar etnis dan agama, maka hubungan gender juga mendukung kelanggengan kekuasaan rejim Orba.

Untuk memahami politik gender ini sangat penting, menganalisis bagaimana rejim Orba ini berhubungan dengan hubungan-hubungan gender sejak ia berkuasa setelah persitiwa 1965. Rejim Orba di bangun di atas kemampuannya untuk memulihkan ketaraturan. Pembunuhan besar-besaran berskala luas yang muncul digunakan untuk memperkuat kesan di masyarakat Indonesia bahwa Orla adalah kacau balau dan tak beraturan. Rejim Orba secara terus-menerus dan sistemis mempropagandakan komunis adalah amoral dan anti agama serta penyebab kekacauan.

Seterusnya **Gerwani** sebagai bagian dari PKI juga menjadi alat untuk menciptakan pondasi politik gender yang secara mendasar mendelegitimasi partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan politik. Kampanye ini ternyata tidak hanya menghancurkan

komunis, tetapi juga menghancurkan gerakan perempuan. Kodrat menjadi kata kunci, khususnya dalam mensubordinasi perempuan. Orba mengkonstruksikan sebuah ideologi gender yang mendasarkan diri pada ibusime, sebuah paham yang melihat kegiatan ekonomi perempuan sebagai bagian dari peranannya sebagai ibu dan partisipasi perempuan dalam politik sebagai tak layak. Politik gender ini termasnifestasikan dalam dokumen-dokumen negara, seperti GBHN, UU Perkawinana No. 1/1974 dan Panca Dharma Wanita.

Dalam usaha untuk memperkuat politik gender tersebut, pemerintah Orba merevitalisasi dan mengelompokkan organisasi-organisasi perempuan yang berafiliasi dengan departemen pemerintah pada tahun 1974. Organisasi-organisasi ini (Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan PKK) membantu pemerintah menyebarluaskan ideologi gender ala Orba. Gender politik ini telah diwarnai pendekatan WID sejak tahun 70-an. Ini dapat dilihat pada Repelita kedua yang menekankan pada "partisipasi populer" dalam pembanguan, dan mengkonsentrasikan pada membawa perempuan supaya lebih terlibat pada proses pembangunan.

Di bawah rejim otorioter, implikasi politik gender ini ternyata sangat jauh, tidak sekedar mendomestikasi perempuan, pemisahan dan depolitisasi perempuan, tetapi juga telah menggunakan tubuh perempuan sebagai instrumen-instrumen untuk tujuan ekonomi politik. Ini nampak pada program KB yang dipaksanakan untuk "hanya" perempuan dengan ongkos yang tinggi, yang khususnya dirasakan oleh perempuan kalangan bawah di pedesaan. Ringkasnya politik gender Orba telah berhasil membawa perempuan Indonesia sebagai kelompok yang homogen apolitis dan mendukung peraturan otiritarian.

b. Gerakan Perempuan Masa Reformasi

Bila sistem pemerintahan yang semakin demokratis dianggap paling kondusif bagi pemberdayaan perempuan, maka di era reformasi ini semestinya pemberdayaan perempuan di Indonesia semakin menemukan bentuknya. Bila ukuran telah berdayanya perempuan di Indonesia dilihat dari kuantitas peran di sejumlah jabatan strategis, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, jsutru ada penurunan di banidng masa-masa akhir rejim orba. Namun, secara kualitatif, peran perempuan itu semakin diperhitungkan juga di pos-pos strategis, seperti yang tampak pada komposisi kabinet kita sekarang. Ini dapat digunakan untuk menjustifikasi, bahwa mungkin saja kualitas perempuan Indonesia semakin terperbaiki.

Hanya saja harus tetap diakui bahwa angka-angka peranan perempuan di sektor strategis tersebut tidak secara otomatis menggambarkan kondisi perempuan di seluruh tanah air. Bukti nyata adalah angka kekerasan terhadap perempuan masih sangat tinggi. Bila pada jaman lampau kekerasan masih berbasis kepatuhan dan dominasi oleh pihak yang lebih berkuasa dalam struktur negara dan budaya (termasuk dalam rumah tangga), maka kini diperlengkap dengan basis industrialisasi yang mensuport perempuan menjadi semacam komoditas.

C. PERAN PERGURUAN TINGGI

Perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan yang memiliki investasi besar dan memiliki nilai strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk keberlangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan di perguruan tinggi merupakan tempat pembentukan peradaban dan budaya suatu bangsa, karena ditopang oleh para SDM yang terdidik dan terlatih.Tradisi yang dicipatakan didalam perguruan tinggi selalu mengedepankan nilai-nilai ilmiah dan objektif. Budaya tersebut dibangun berdasarkan prinsip kebebasan berfikir, berpendapat dan mimbar akademik dalam suasana akademik yang dinamis, terbuka dan ilmiah. Perilaku ilmiah, peduli sosial dan perilaku positif lainnya yang dilandasi oleh nilai dan norma menunjukkan arah pengembangan kehidupan bangsa dan masyarakat.Perilaku inilah yang seharusnya mampu dikembangkan dan dipertahankan didalam sebuah institusi perguruan tinggi.

Kondisi ini menjadi ruang bagi kader-kader PMII yang berlatar belakang mahasiswa untuk mengapresiasi pengetahuan yang didapat dari perkuliahan/kampus. Bukan lantas menjauh bahkan acuh tak acuh dengan kondisi realita disekitarnya. Mahasiswa yang merupakan penyambung lidah antara rakyat dan pemerintah seharusnya menjadi garda terdepan dalam persoalan-persoalan rakyat. Kondisi perguruan tinggi dan kondisi masyarakat pada umumnya seolah-olah terbatasi oleh dinding yang tak bisa ditembus oleh rakyat biasa. Ketimpangan ini mengakibatkan tidak semua rakyat memperoleh pendidikan tinggi seperti khalayak yang memiliki materi lebih bahkan pas-pasan. Keterdesakan ekonomi mengakibatkan rakyat memilih untuk tidak masuk ke ranah perguruan tinggi. Kondisi ini mencerminkan perguruan tinggi telah membatasi hubungan sosial antara mahasiswa dengan rakyat.

Dalam konteks kekinian, mayoritas mahasiswa menjadi merasa enggan untuk mengambil dan mengikuti kegiatan di luar perkuliahan. Hedonisme, pragmatisme dan instanisme ternyata semakin menggejala dikalangan generasi muda khususnya mahasiswa terutama kaum perempuan. Sampai mereka kehilangan identitas sebagai kaum intelektual yang dulunya dengan lantang meneriakkan dan memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat lemah dan terlemahkan. Kalaupun masih ada, itupun juga dalam jumlah yang sangat minim dibandingkan jumlah keseluruhan. Pergeseran ini jelas disebabkan karena sensitifitas mahasiswa yang selalu tergerus perubahan zaman. Selain itu pula, rasa nasionalisme semakin terdegradasi dengan seiring sensitifitas sosial yang juga sering menurun karena tingkat individual yang setiap hari kian meninggi.

Kelemahan fundamental yang dapat dianalisis dari realitas pendidikan di Indonesia adalah paradigma industrialisme yang telah masuk ke dalam domain dunia pendidikan kita. Alih-alih sebagai wujud sarana pembangunan dan pengembangan diri manusia, makna pendidikan telah tereduksi begitu besar hanya sebatas sub sistem dari budaya industrialisasi. Dengan tujuan mengotak-ngotakan pengetahuan dengan realita yang

mengakibatkan paradigma mahasiswa bahkan masyarakat menjadi terpecah-pecah dan tidak satu kesatuan.

Hal tersebut kiranya bukanlah hal yang aneh jika fenomena pendidikan Indonesia saat ini dibaca dalam kerangka kebutuhan masyarakat industri, dimana peserta didik adalah manusia yang diproyeksikan sebagai "tenaga kerja profesional di bidangnya" yang tidak lain adalah "robot-robot" industri kapitalistik yang mahir dan terampil dalam bekerja sesuai dengan sistem yang telah ada tidak peduli seberapa tidak manusiawinya kah sistem tersebut.

Kondisi inilah yang akan membawa dampak sangat besar bagi gerakan perempuan di KOPRI sebagai organisasi PMII yang concern mengenai isu-isu perempuan. karena doktrinisasi pendidikan yang sangat kuat memaksa mahasiswa untuk berfikir lebih cepat selesai kuliah, bekerja, dan menghasilkan uang yang banyak. Yang pada akhirnya menciptakan manusia-manusia yang individualistik.

D. TANTANGAN GLOBAL
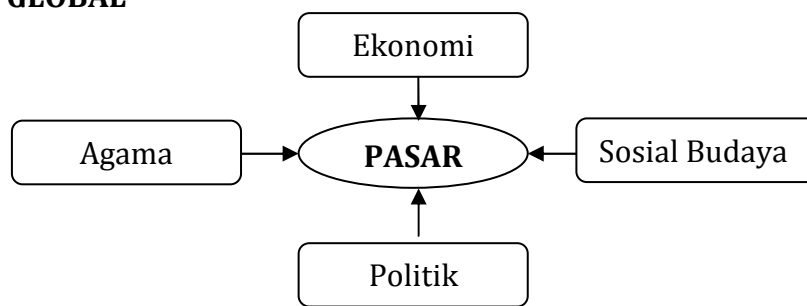
Bagan 1
Hambatan-hambatan kesetaraan perempuan

Bagan diatas dapat dirangkai dan menjadi landasan bersama untuk menjawab permasalahan-permasalahan perempuan pada umumnya. Hambatan-hambatan yang membuat perempuan menjadi terbelakang dari segala aspek baik ekonomi, popitik, sosial budaya, dan agama merupakan balutan dari arus pasar dan permintaan pasar. Tantangan atau hambatan-hambatan inilah yang hharus menjadi landasan utama kader-kader perempuan PMII yang terorganisasikan lewat KOPRI untuk melakukan sebuah gerakan sosial dan menjadi perjuangan bersama.

a. Hambatan Ekonomi

Hambatan ekonomi paling pokok terhadap kesetaraan perempuan adalah system ekonomi kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem produksi sosial yang berdiri atas dasar kepemilikan terhadap kapital (modal) baik dalam bentuk tanah, uang, mesin, dll oleh segelintir (minoritas) orang. Kepemilikan ini lah yang menghambat kemajuan tenaga produktif (alat kerja/teknologi, sasaran kerja/alam/bahan mentah, dan tenaga kerja/laki-

laki dan perempuan) dan menghambat pemetaraan kemakmuran. Watak yang melekat pada kapitalisme adalah eksploitatif, akumulatif, ekspansif. Itulah sebabnya sistem ini selalu mendahulukan profit (keuntungan) ketimbang kemanusiaan, demi pelipatgandaan kekayaan sedikit orang melaui pemiskinan banyak orang.

Neoliberalisme adalah paham kebijakan yang menjadi jalan keluar dari krisis kapitalisme era 1970-an. Esensinya adalah bagaimana mengusahakan agar perdagangan antar bangsa menjadi lebih mudah. Maksudnya, mengusahakan agar barang-barang, sumber daya, dan perusahaan-perusahaan lebih bebas bergerak, dalam upaya untuk mendapatkan sumber daya yang lebih murah, untuk memaksimalkan keuntungan dan efisiensi.

Dampak Neoliberalisme terhadap kaum perempuan paling nyata ditunjukkan dalam wujud **feminisasi kemiskinan**. Feminisasi kemiskinan menunjukkan bahwa korban kemiskinan paling banyak adalah perempuan. Kapitalisme neoliberal lah penyebab kemiskinan dan feminisasi kemiskinan di dunia saat ini. Sebagai contoh sederhana dapat kita bandingkan jumlah kekayaan segelintir orang/keluarga/perusahaan terkaya di dunia dengan pendapatan rakyat di banyak negara-negara miskin di dunia[1] (tiga orang terkaya dunia memiliki asset keuangan lebih besar dari gabungan 10% penduduk dunia termiskin).

Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) mengungkap bahwa dari 1,3 miliar warga dunia yang miskin, 70 % di antaranya adalah kaum perempuan (Kompas, Senin, 14/7/2003) dengan pendapatan dibawah 1 US Dollar per hari. Padahal, subsidi untuk seekor sapi saja, di Eropa, besarnya 2 USD perhari (Sri Palupi, Ketua Institute for Ecosoc Rights, Jurnal Perempuan).

Menurut Laporan UNDP, Statistik dan Kecenderungan Perempuan Dunia 2010, dua pertiga dari 774 juta angka buta huruf dewasa di dunia adalah perempuan—proporsi ini tidak berubah sejak dua dekade terakhir. 72 juta anak tak lagi bersekolah, dan 54% nya adalah perempuan.

Dari 15,5 juta penderita buta huruf di Indonesia, 68% diantaranya adalah kaum perempuan di bawah 15 tahun.[2] Sementara tingkat buta huruf perempuan di tahun 2010 sebesar 6,5 juta, dua kali lipat dibanding laki-laki, sehingga tidak heran jika perempuan kemudian lebih sedikit berpartisipasi di pendidikan tinggi, serta mendapatkan pekerjaan yang paling tidak aman serta rendah keterampilan;

Dikatakan bahwa partisipasi perempuan dalam pendidikan naik 22%, dari hanya 1% di tahun1970 menjadi 23% tahun 2009—selama 29 tahun hanya naik 22%! Dari data itu, ada 11% perempuan berusia 10 tahun ke atas yang belum pernah bersekolah sama sekali sampai sekarang; hanya 1,5% perempuan yang sampai pada bangku Universitas; dan 70,7% perempuan tidak bersekolah lagi;

---

[1] Lihat: http://en.wikipedia.org/wiki/Forbes_list_of_billionaires_(2011) dan http://en.wikipedia.org/wiki/International_inequality
[2] Data Depdiknas tahun 2005.

Bidang yang ditempati perempuan yang berpartisipasi di Pendidikan Tinggi paling banyak adalah obat-obatan dan kesehatan (70%), pendidikan (60%), bisnis atau administrasi (55%). Subjek dengan partisipasi perempuan terendah adalah permesinan 20%, hukum 35%, dan teknologi pertanian 40%.

Menurut Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) di tahun 2008 angka kematian Ibu (AKI) di Indonesia adalah 320 per 100.000 kelahiran, namun menurut banyak data akhir-akhir ini jumlahnya menurun menjadi 228 kematian per 100.000 kelahiran. Namun tetap saja merupakan yang tertinggi di Asia, sehingga membuat target MDGs 2015 dipastikan gagal;

Menurut data AGKIA 24 Juni 2011, setiap tiga menit satu balita meninggal di Indonesia, dan setiap 30 menit seorang ibu meninggal. Lebih dari 17 persen persalinan tidak ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, dan hanya separuh dari jumlah persalinan terjadi di fasilitas layanan kesehatan.

Erat kaitannya dengan persoalan AKI, jumlah bidan di Indonesia hanya mencapai 175.114 orang, dan dari jumlah itu hanya 10.793 bidan yang berpraktik di desa[3] serta 10.808 bidan berpraktik di daerah terpencil. Hanya setengah dari seluruh jumlah desa di Indonesia yang mempunyai bidan dan secara rerata nasional di 33 provinsi, 23% bidan desa justru tak tinggal di desa.

Akses terhadap makanan maupun makanan bergizi juga semakin sulit. Bukan karena ketiadaan produk dan bahan makanan di pasar, melainkan karena rendahnya pendapatan masyarakat yang tidak sebanding dengan tingginya harga produk makanan. Inilah yang mengakibatkan kelaparan[4] dan gizi buruk. Dalam Laporan Dana Perserikatan Bangsa-bangsa Untuk Anak (Unicef), dari 23,5 juta balita di Indonesia, 8,3 persen di antaranya menderita gizi buruk, dan 1,67 juta anak balita menderita busung lapar (Sri Palupi, Jurnal Perempuan). Sekitar 400.000 bayi lahir setiap tahun dengan gangguan intelektual karena kekurangan iodium selama kehamilan. Sekitar 2.300 perempuan Indonesia meninggal per tahun selama masa kehamilan dan melahirkan karena kekurangan zat besi (Kompas, Kamis 23 Juni 2005). Sekitar 14.000 anak per tahun rentan infeksi karena kekurangan vitamin A (Kompas, Tini Hadad, Yayasan Kesehatan Perempuan).

Kemiskinan juga mengakibatkan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan manusia (Human Trafficking)[5], yang memakan korban paling banyak perempuan dan anak.

---

[3] http://www.bataviase.co.id/node/732402

[4] Menurut ILO, pada saat ini, separuh dari pekerja di dunia, yakni sebesar 1,4 milyar, hidup kurang dari 2 dolar perhari. Menurut FAO, jumlah orang yang kelaparan pun mengalami peningkatan sebesar 18 juta, menjadi total 852 juta, termasuk 815 juta di negara berkembang; 28 juta di negara-negara yang sedang mengalami transisi, dan 9 juta di negara-negara industri maju (Laporan FAO).

[5]*Trafficking In Persons* (Perdagangan Manusia) menurut definisi PBB adalah *Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk*

Menurut Kementerian Perempuan, jumlah TKI perempuan di luar negeri, sejak tahun 2001-2004, adalah 1.047.130 (77%) dari jumlah keseluruhan 1.357.703 orang. Dalam Catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dari 14.020 kasus yang teridentifikasi tahun 2004, 562 kasus di antaranya merupakan kasus-kasus perdagangan orang (Kompas, 27 Juni 2005). Kemudian, dalam laporannya, ILO mengungkapkan, lebih dari 10.000 anak Indonesia dibawah 18 tahun diperdagangkan sebagai pekerja seksual di lima kota besar di negaranya sendiri[6]. Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa perdagangan anak balita yang melibatkan sindikat internasional menunjukkan peningkatan. Pada 2003, ada 102 kasus yang terbongkar, tahun 2004 bertambah menjadi 192 kasus. Jumlah anak yang menjadi korban tujuan prostitusi meningkat dari berbagai rumah bordil di Indonesia, 30 persen atau sekitar 200-300 ribu perempuan yang dilacurkan adalah anak (Maret 2005)[7]. UNICEF dalam laporannya mengungkapkan bahwa 30% (sekitar 40-70 ribu anak) anak-anak yang terjerumus ke dalam prostitusi berusia di bawah 18 tahun[8].

Seksualitas dan kecantikan. Perempuan juga dieksploitasi seksualitasnya, salah satunya, melalui standar kecantikan. Standar kecantikan dipakai untuk mengkontrol tubuh perempuan, terlebih lagi dipakai sebagai syarat untuk bekerja. Banyak perempuan di PHK hanya karena tubuhnya tidak memenuhi standar kecantikan yang sudah disepakati. Dampak yang paling parah dari mitos kecantikan ini adalah menyebabkan kaum muda hanya memikirkan kecantikannya saja, menyebabkan sakit dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Kaum muda saat ini—khususnya di negara-negara maju banyak yang menderita penyakit Bullimia dan atau Anorexia, yang tertinggi didunia adalah Amerika Serikat. Pemujaan terhadap berat badan membuat banyak kaum perempuan menyakiti diri mereka dengan melakukan diet ketat hingga membuat mereka fobia terhadap makanan. Terdata 15% perempuan muda yang meninggal karena Bullimia dan 95% penderita Bulimia dan Anoreksia adalah perempuan. Eksploitasi ini juga meliputi industri mode dan pornografi, dimana kecantikan dan 'keseksian' perempuan adalah komoditas industri yang hanya menguntungkan kapitalisme.

b. Hambatan Sosial Budaya

Hambatan social budaya yang paling pokok terhadap kesetaraan perempuan adalah patriarki. Patriarki berasal dari bahasa Latin, yaitu pater (bapak) dan arche (aturan), sehingga kalau didefinisikan secara harafiah menjadi aturan ayah. Kaum feminis mencoba

---

*pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekerasan, atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi (*2000 UN Protocol to Prevent, *Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially women and Children; Supplement to UN Convention on Transnational Crime*).

[6] Depnakertrans, Natalis Pigay, Migrasi dan Penyelundupan Manusia.

[7] Kompas, 20 Juni 2005.

[8] Koran Tempo, Maret 2003.

untuk memberikan satu definisi yang bisa menjelaskan secara utuh, yaitu, satu sistem politik dan sosial dimana laki-laki dijadikan sentral dalam setiap pengambilan kebijakan, dan aturan-aturan yang berada dalam masyarakat, yang menyebabkan kaum perempuan hanya dianggap sebagai manusia kelas dua.

Sebab kemunculannya, diperkirakan bersamaan dengan tersingkirnya perempuan dari produksi sosial holtikultura menjadi pertanian, pelembagaan kepemilikan pribadi (kelas-kelas dalam masyarakat), keluarga, dan Negara, pada masa awal peradaban manusia (zaman sejarah) dan berakhirnya masa primitif (zaman pra sejarah). Patriarki berkembang penuh sebagai sebuah konsep tatanan sosial pada periode feodalisme.

Beberapa data fakta-fakta perwujudan patriarki, diantaranya: Sebanyak 52% partisipasi tenaga kerja perempuan di pasar kerja (2010), namun, upah pekerja perempuan lebih rendah dari laki-laki—setiap satu dolar dari upah laki-laki perempuan Indonesia hanya menerima 77 sen saja, lebih kecil dibanding 96 sen yang diterima perempuan di Thailand; pekerja perempuan Indonesia antara tahun 2006-2011 juga mendapatkan kontrak kerja yang lebih tak pasti dibanding laki-laki dengan jumlah pekerja kontrak perempuan, paling banyak di perusahaan-perusahaan ekspor, sekitar 25% dibanding laki-laki yang hanya 10%[9]. Menurut Biro Pusat Statistik wilayah Jakarta, 885 dari total pengangguran adalah perempuan;

UU NO.1 Tahun 1974, merupakan undang-undang yang mengesahkan, bahwa poligami diperbolehkan untuk dilakukan, walaupun dengan syarat-syarat tertentu. UU ini juga banyak menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab domestik dalam pasal-pasalnya, yaitu berkewajiban atas urusan kerumahtanggaan.

Sebuah studi tentang buruh perempuan pada industri sepatu di Tangerang, melaporkan bahwa biaya tenaga kerja (upah) buruh laki-laki adalah 10-15% dari total biaya produksi. Sementara bila mempekerjakan perempuan, biaya tenaga kerja dapat ditekan hingga 5-8% dari total biaya produksi (Tjandraningsih, 1991:18). Dalam kasus tersebut, persentase buruh perempuan adalah 90% dari total buruh.

Buruh perempuan di Indonesia menerima upah lebih rendah daripada buruh laki-laki. Secara rata-rata keseluruhan buruh perempuan hanya menerima 74 persen dari upah yang diterima buruh laki-laki. Di Banten dan Kalimantan Timur, buruh perempuan hanya menerima 62 persen dari upah buruh laki-laki, yang merupakan kondisi terburuk dibandingkan dengan provinsi lain. (Edi Priono, Kompas).

Komnas Perempuan menyebutkan, selama 5 tahun terakhir, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan yang terbanyak dialami, dan yang paling sering ditangani, oleh Pengadilan Agama, adalah penelantaran ekonomi (61%).

---

[9] World Development Report on Gender Equality & Development, *Jakarta Post*, 21 Desember 2011.

c. Hambatan Politik

Kebijakan Anti demokrasi, anti keberagaman, fundamentalisme dan militerisme menghambat perkembangan perempuan karena menutup ruang demokrasi bagi perempuan dan masyarakat. Ruang demokrasi (*democratic space*) merupakan basis bagi setiap individu untuk mengembangkan kapasitas kognitif, kepribadian, pandangan, dan kekuatannya. Ruang demokrasi memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk terlibat aktif dalam organisasi-organisasi, terlibat aktif untuk membuat kebijakan, mengontrol kebijakan maupun mengkritik kebijakan. Ruang demokrasi memberikan kesempatan kepada setiap individu (baik perempuan maupun laki-laki) untuk mendapatkan informasi maupun komunikasi, baik itu yang non politis maupun yang politis.

Dahulu militerisme yang menopang kekuasaan Orde Baru menutup ruang demokrasi bagi rakyat untuk berpartisipasi. Pada masa awal kekuasaannya Orde Baru menghancurkan partisipasi perempuan dengan membubarkan organisasi-organisasi perempuan, salah satunya adalah Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI). Setelah menghancurkan Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI), rejim orde baru kemudian menciptakan organisasi-organisasi perempuan yang baru, Dharwa Wanita--bagi istri pegawai negeri sipil, Dharma Pertiwi—bagi istri yang suaminya bekerja di salah satu cabang angkatan bersenjata, dan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)—diluar organisasi perempuan berbasis keagaman seperti Aisiyah dan Fatayat.

Organisasi perempuan yang ada tersebut hanya dipakai untuk menyokong kekuasaan politik Ode Baru dan Golongan Karya (Golkar), yang dilemahkan partisipasinya, dan dibuat menjadi massa mengambang.

Orde Baru juga menghancurkan kesempatan perempuan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas, bahkan dihancurkan ingatannya pada sejarah perjuangan pembebasan perempuan sebelumnya melalui pembakaran buku-buku, materi-materi berbau kiri maupun pemutarbalikan sejarah. Perempuan dan organisasi perempuan yang ada kehilangan kekuatan intelektualnya, karena dihilangkan kaitannya dengan sejarah masa lalu dan pasokan informasi seluas-luasnya. Dalam hal itu semua, sebenarnya, negara melalui berbagai aparatusnya, telah melakukan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada kaum perempuan (*by commission*).

Militerisme bahkan melakukan penindasan keji kepada kaum perempuan. Di daerah-daerah konflik, seperti Aceh, Poso, Timor-Timur, Papua Barat, Tragedi 1965, Kerusuhan 1998, kaum perempuan menjadi korban keganasan militer. Banyak perempuan menjadi korban pembunuhan, pemukulan, pelecehan seksual, ataupun pemerkosaan. Militerisme memperlihatkan bahwa negara melakukan kekerasan struktural yang dilegitimasi atas nama Daerah Otonomi Militer (DOM), Daerah Operasi Militer, Status Darurat, dll. Dan negara membiarkan kekerasan ini berlangsung (*by ommision*), karena hingga saat ini pelaku-pelaku kekerasan tersebut masih melenggang, bahkan ikut serta dalam pemilihan umum.

Belakangan ini, ditandai oleh bertambahnya peraturan-peraturan daerah yang bernuansa fundamentalis relijius, kemungkinan kaum perempuan Indonesia untuk dapat dengan bebas bergerak dan memiliki hak atas tubuhnya semakin ditutup. Ditambah lagi dengan wacana yang belakangan ini merebak menyangkut dianjurkannya sunat perempuan oleh Kementerian Kesehatan. Ini semua menunjukkan meningkatnya wujud-wujud penindasan terhadap perempuan dari kebudayaan konservatif dan intepretasi ajaran agama terhadap tubuh perempuan. Tubuh dan seksualitas perempuan dianggap sebagai ukuran moral masyarakat hingga harus dikontrol oleh aturan-aturan yang bersumber pada otoritas kekuasaan dan penilaian laki-laki (patriarki).

d. Hambatan Agama

FASISME RELIGIUS adalah istilah baru yang diwacanakan olen Coen Husein Pontoh, lebih maju dari devinisi radikalisme dan fundamentalisme. Fasisme sendiri adalah sebuah sistem yang dibangun oleh kelompok borjuis kecil dan tengah Eropa untuk menguasai negara. Fasisme juga dikatakan sebagai penguasaan atau kediktatoran penuh reaksioner. Adapun ciri-ciri dari fasisme religiuos adalah:

1. Gerakannya mengambil bentuk mobilisasi massa di jalanan; Contoh: militer, FPI, HTI, dll. (isu-isu yang diusung: anti pluralisme, anti demokrasi, anti liberalisme, anti komunisme dll).
2. Percaya pada keagungan sistem dan nilai-nilai sosial masa lalu; (seperti konsep khilafah, kehebatan kepemimpinan masa lalu dll)

Tindakan fasisme religious sangat merugikan perempuan, dengan claim kebenaran tafsir yang mereka suguhkan, apa yang kemudian dilakukan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Contohnya adalah serangan brutal yang dilakukan oleh FPI dan kelompok kanan lainnya terhadap ideology atau faham yang di angap sesat (ILGA, Ahmadiyah, Komunisme dll), penerapan perda di beberapa wilayah di Indonesia; dengan dalih kemuliaan untuk perempuan, perempuan terbelenggu dalam ruang public dan mengembalikannya ke ranah domestic. Bukan hanya itu, penafsiran mereka yang dianggap sebuah kebenaran tunggal dalam membolehkan poligami dan etika perempuan menjadikan terkurung dalam ruang yang sama sekali jauh dari esensi kehidupannya.

Kunci kemenangan pertarungan dengan kelompok kanan radikal/Fasisme Religius ini tergantung pada dua hal berikut:

1. Seberapa mampu gerakan progresif membangun basis massa yang terorganisir dan berkesadaran kritis;
2. Seberapa mampu kaum progresif memenangkan pertarungan di jalan-jalan.

E. REFLEKSI PARADIGMA KOPRI

Paradigma merupakan hal yang sangat vital dalam organisasi, dan menjadi tolak ukur dalam memandang suatu kondisi atau realita. Bagi PMII, pengertian paradigma dapat dirumuskan sebagai titik pijak untuk menentukan cara pandang, menyusun sebuah teori, menyusun sebuah pertanyaan, dan rumusan mengenai suatu masalah. Berkaitan dengan fenomena perempuan dalam konteks nasional serta sinergitas gerakan KOPRI dalam tinjauan sosiologis-historis, perlu ditinjau ulang paradigma PMII secara global, baik paradigma arus balik masyarakat pinggiran maupun paradigma kritis transformatif itu sendiri.

Hingga saat ini, tantangan global yang lebih kompleks dalam era kontemporer harus disikapi secara komprehenif dalam berbagai tinjauan. Fenomena yang terjadi di internal kopri itu sendiri, semakin naik struktur kepengurusan, kader-kader KOPRI semakin kian terkikis. Permasalahannya adalah banyak kader KOPRI itu sendiri yang terjebak oleh kontradiksi ekonomi, yaitu peluang usaha dan karier kader itu sendiri. Tentu saja, fenomena ini bukan terjadi secara alamiah, tetapi lebih dari itu, bagaimana KOPRI mampu menjawab tantangan kontradiksi ekonomi itu sendiri demi kaderisasi KOPRI.

Di dalam tatanan global, permasalahan penindasan perempuan yang terdiri dari hegemoni relasi ekonomi dan patriarki itu sendiri. Permasalahan tersebut semakin dimapankan oleh media komunikasi yang mampu merebut ruang gerak grass root, juga hegemoni kapital/ modal sehingga merebut kemandirian relasi ekonomi.

Jika dua problematika utama tersebut dimapankan oleh struktur ekonomi dan politik, maka mau tidak mau pembedahan masalah penindasan tersebut dikaji melalui pisau analisa yang komprehensif. Ketimpangan yang terjadi dalam gerakan KOPRI itu sendiri adalah terdapat ruang kosong antara pemahaman secar teoritik dan kesadaran secara praktik. Kajian yang dimapankan dalam ruang diskursus tidak mampu menjawab permasalahan jika saja tidak mampu melakukan advokasi hingga ke ruang-ruang marjinal/ pelosok, terutama dalam merebut kesadaran yang telah direnggut kaum pemodal.

Di sisi lain, diaspora gerakan KOPRI diharapkan mampu mengkonsolidasikan diri dengan berbagai gerakan perempuan secara intens. Hingga saat ini, hal terpenting yang bisa men-counter ruang geografis penindas adalah semangat persatuan dan nasionalisme itu sendiri. Hal ini tidak mampu terwujud jika tidak ada konsolidasi secara massif di antara berbagai elemen, baik gerakan mahasiswa, buruh tani, dan gerakan lain yang terkait. Konsolidasi holistik tersebut mampu menciptakan kemandirian gerakan dan solidaritas gerakan perempuan. Titik tekan hal ini adalah menciptakan kader-kader petarung yang siap terjun di di masyarakat dengan basis kompetensi dan integritas gerakan.

Secara general, paradigma KOPRI dapat direfleksikan melalui konsolidasi basis-holistik. Di satu sisi, gerakan KOPRI diprioritaskan ke dalam sinergitas gerakan antara penguatan teoritik dengan advokasi grass root, juga penguatan konsolidasi interkoneksi, baik melalui relasi ekonomi, relasi politik, maupun relasi antar gerakan perempuan.

F. KOPRI SEBAGAI GERAKAN PEREMPUAN YANG "Khas"

Sejarah berdirinya KOPRI, sampai saat ini masih dianggap *second class* dari organisasi PMII. Tanpa dipungkiri keberadaan KOPRI berangkat dari institusi PMII dan menjadi kesadaran dan kebutuhan bersama. Keberadaan KOPRI tidak lantas menjadi bumerang bagi PMII apalagi menjadi lawan dalam ruang-ruang yang tidak akan pernah membuat kader berfikir dewasa dan mandiri.

Semakin banyaknya gerakan-gerakan perempuan saat ini, KOPRI berusaha untuk membuat arah gerakan KOPRI yang "khas". Ada dua landasan yang akan membuat gerakan KOPRI memiliki ciri dan menjadi arah gerak KOPRI. Gerakan KOPRI perlu adanya penguatan-penguatan dari basis massa atau kader-kader PMII.

Penguatan basis ideologi, faktor utama yang membuat kader perempuan PMII tidak bertahan lama didalam organisasi adalah kurangnya penguatan ideologisasi baik landasan dan asupan-asupan gizi intelektual. Ketika sudah menemukan dasar-dasar ideologi, maka akan mempermudah fungsionaris kader dan organizer KOPRI untuk menentukan berbagai langkah gerak serta kebijakan yang berkaitan dengan perempuan dalam perspektif gender yang tetap memagang nilai-nilai dasar islam Ahlussunnah wal Jama'ah. Karena dari nilai-nilai ini telah melahirkan berbagai pandangan dan kemudian dipakai untuk menajamkan analisa untuk melihat berbagai persoalan perempuan.

Penguatan basis gerakan, paradigma gerakan KOPRI harus dipertajam lewat penggalian/pengkajian/ekplorasi pemokiran yang berkaitan dengan cara pandang dan cara lihat organisasi terhadap setiap persoalan yang dihadapi. ASWAJA merupakan salah satu metode berfikir yang dianggap masih penting dalam melakukan pembacaanpersoalan, khususya persoalan kesetaraan gender yang menjadi fokus kecenderungan KOPRI.

Gerakan yang dapat dilakukan KOPRI sebagai wujud bentuk perubahan dalam wacana-wacana baru dan menjawab permasalahan-permasalahan perempuan baik internal dan eksternal KOPRI. Dan gerakan KOPRI akan lebih massif dan terorganisir baik ketika arah gerak dan tujuan gerakan KOPRI diperjelas. Dua gerakan strategis yang dapat dilakukan KOPRI untuk tetap konsisten dengan gerakan dan tujuan PMII. Disamping sebagai kader KOPRI (karena jati dirinya sebagai perempuan) yang dapat bergerak pada ranah issue-issue perempuan, disamping yang lain sebagai kader PMII secara mutlak dan senantiasa dapat bergerak pada issue-issue gerakan sosial laiinya. Jadi pada dasarnya KOPRI harus mampu menerobos pembagian kerja secara gender dengan merumuskan **"dua strategi gerakan":**

1. Gerakan politik, out put yang akan dicapai dalam proses gerakan politik adalah penguasaan leading sector oleh kader-kader perempuan PMII.
2. Gerakan sosial, out put yang akan dicapai dalam proses gerakan sosial adalah advokasi kepada masyarakat baik advokasi kebijakan publik yang tidak berpihak kepada perempuan dan advokasi ke basis massa (buruh, tani, mahasiswa, kaum miskin kota dll)

G. NARASI GERAKAN KORPS PMII PUTERI (KOPRI)

Sebagai wujud menciptakan gerakan KOPRI yang "khas" KOPRI berusaha membangun narasi gerakan KOPRI untuk memperjelas gerakan KOPRI. **Narasi gerakan feminis ASWAJA** yang kami gagas merupakan pemikiran jernih dan cemerlang dari kader-kader perempuan PMII untuk menentukan arah gerakan KOPRI.

KOPRI yang juga bagian dari instrumen ideologi Aswaja hendaknya bisa mengurai secara sistematis tentang Aswaja dan melakukan pembacaan ulang konteks kekinian terkait kebutuhan mendasar bagi pembelaan kaum perempuan. dimana manifestasi ketidakadilan gender terhadap perempuan semakin merajalela dimuka bumi ini, seperti: marjinalisasi, stereotype, subordinasi, kekerasaan, dan beban ganda sangat erat dengan perempuan. seperti yang diungkapkan Hasan Hanafi, perempuan harus kuat dan progresif serta menolak ketertundukan yang menyebabkan keterpurukan bagi kaumnya. Dengan hal itu, maka perempuan harus bisa lebih mandiri dengan dinamikanya untuk mendorong tatanan nilai yang ekologis bagi semua makhluk dimuka bumi. Dan tidak mungkin sebuah perjuangan tanpa ideologi yang jelas, garis perjuangan politik yang sistematis, organisasi/alat perjuangan, serta narasi gerakan yang kuat untuk merealisasikan cita-cita tersebut.

Dengan landasan ideologi ASWAJA sebagai Manhajul Fikr, ASWAJA sebagai landasan berfikir KOPRI dan mengimplementasikannya menjadi ASWAJA sebagai Manhajul Harakah atau ASWAJA sebagai landasan bergerak. Narasi gerakan perempuan yang berangkat dari barat merupakan pembelajaran berharga yang dapat kami jadikan landasan utama dalam pembentukan "feminis". Feminis merupakan pelaku atau objek yang melakukan gerakan sensitif perempuan.

Sadar dari narasi gerakan yang ada mulai dari gerakan feminis liberal sampai gerakan feminis sosial memiliki landasan berfikir yang jelas dizamannya. Dan KOPRI yang melihat realita sesuai zamannya saat ini berusaha membentuk narasi yang sesuai dengan konteks dan ideologi PMII yang berlandaskan ke-Islaman. Dengan landasan itulah kami berusaha mengkolaborasikan keilmua ini menjadi satu kesatuan yang utuh menjadi sebuah narasi gerakan.

Dengan Narasi gerakan feminis ASWAJA, dimaksud adalah gerakan perempuan yang berpresfektif ASWAJA dengan mensistematiskan persoalan-persoalan perempuan berpresfektif dengan nilai-nilai ASWAJA. Yaitu, Tawasuth (moderat), Tawazun (netral), Tasamuh (toleran), Ta'adul (Adil), Musawwah (kesetaraan), syura(musyawarah/demokrasi), Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf (memanusiakan manusia).

Dalam prinsip ASWAJA diatas, narasi gerakan KOPRI harus diperjelas dengan tiga pilar.
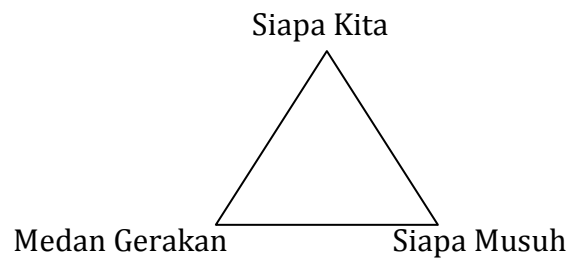
Bagan 2. Prasyarat pengetahuan gerakan

Seperti yang digambarkan didalam multy level strategi, untuk itu KOPRI pun harus mampu menjawab tantangan yang ada didepan mata. Maka dari itu, KOPRI berusaha menghadirkan musuh kita bersama agar terciptanya gerakan yang massif dan mengikis keberadaan dan ruang geraknya. Karena akar masalah yang menyebabkan terjadinya degradasi kemanusiaan yang terjadi (baik laki-laki maupun perempuan) adalah bergerak bebasnya musuh rakyat yang menguasai seluruh sendi-sendi Bangsa dan Negara, tidak terkecuali perempuan.

Dengan adanya prasyarat pengetahuan gerakan diatas, KOPRI dapat membaca dan mempertegas pola gerakan yang lebih kongkrit dan riil. Ketika KOPRI menemukan jati dirinya, sebagai Badan Semi Otonom yang memiliki ideologi-politik-organisasi yang jelas serta memiliki otoritas dalam kaderisasi perempuan, maka harus ada upaya pengawalan yang sistematis baik pada sistem pengawalan pembentukan kognisi/kesadaran kader. Penguatan basis ideologi dan basis gerakan harus dimulai sejak dini oleh kader-kader perempuan PMII yang terstruktur menjadi KOPRI. Seperti bagan dibawah ini:
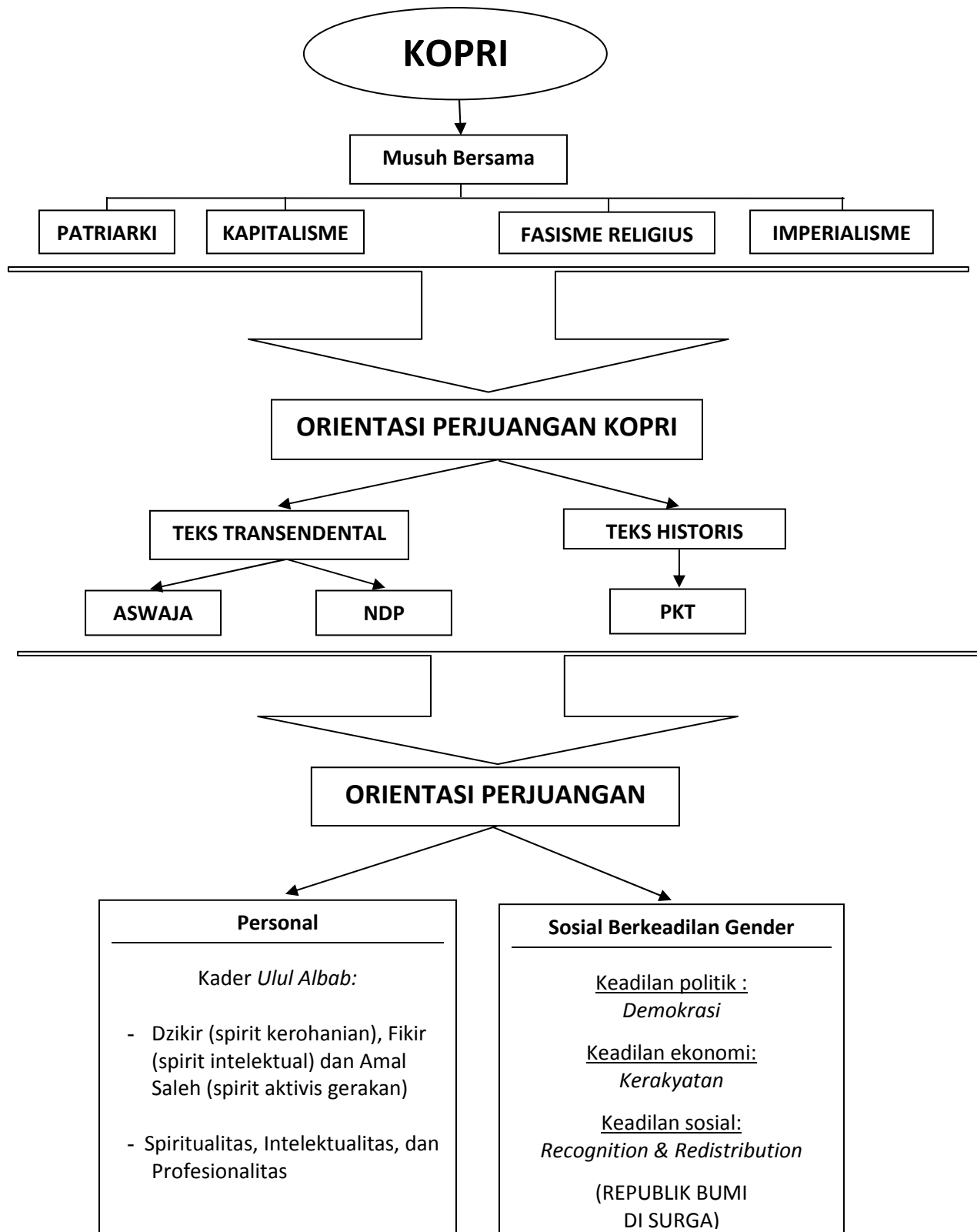
Bagan 3. Nilai dan Orientasi perjuangan

H. KOPRI DAN PMII: BERBARENG BERGERAK

Kondisi internal dan eksternal KOPRI menjadi problem yang perlu diselesaikan dengan bijaksana. Kondisi internal, kenyataan minimnya kader perempuan PMII yang mampu bertahan dijenjang organisasi yang lebih tinggi, rendahnya minat kader perempuan untuk bergelut dengan wilayah pemikiran, minimnya kader perempuan yang terlibat dengan akses-akses jaringan diluar organisasi KOPRI, kenyataan biasnya fungsi administrasi KOPRI, tidak ada acuan atau panduan sebagai pedoman melakukan kaderisasi dan kurangnya pemahaman kader-kader laki-laki tentang kesetaraan dan keadilan gender. Kenyataan ini sebagai salah satu latar belakang persoalan yang dihadapi KOPRI.

Masih dalam konteks internal, salah satu yang bisa dianggap sebagai keberhasilan dari pengakaderan adalah munculnya kader-kader perempuan PMII sebagai tokoh yang dapat mempengaruhi jalannya perubahan baik dalam konteks lokal maupun nasional bahkan internasional. Kader-kader perempuan yang tersebar diseluruh Indonesia merupakan satu kekuatan jaringan pengetahuan dan sosial ekonomi politik yang harus mampu dibangun untuk mempercepat perubahan sosial yang lebih baik.

Dalam faktor eksternal, KOPRI merupakan sebuah institusi yang intens dengan persoalan-persoalan perempuan.Ini menjadi tantangan bagi KOPRI untuk terus melakuan penguatan organisasi dan individu kader untuk dapat terjun langsung melakukan perubahan dalam konteks sosial. Bukan hanya itu, KOPRI pun akan dihadapkan dengan lembaga lain yang juga konsen dengan persoalan-persoalan perempuan (Departemen pemerintahan, LSM, NGO, dll). KOPRI PMII harus mampu mengkonsolidasikan diri bahkan me-*leading* baik gagasan sampai gerakan ke *grass root*.

Problem diatas, harus menjadi prioritas utama dalam proses pengkaderan KOPRI yang baik. Dan KOPRI membutuhkan legitimasi struktur, pengembangan dan pembinaan organisasi, dukungan moral politik, intelektual dari PMII sebagai organisasi induk gerakan agar setiap pilihan gerakan yang diambil KOPRI nantinya akan saling menguatkan dan sinergis dengan *grand design* yang telah dirancang PMII dalam melihat persoalan masyarakat, Negara, dan dunia.

I. PENUTUP

Narasi yang cukup panjang diatas, kami maksudkan sebagai ikhtiar kami dalam membaca kenyataan realita Indonesia, dimana kita semua, PMII dan KOPRI hidup dan berkembang didalamnya. Bacaan tersebut penting mengingat pengkaderan KOPRI yang akan kami sampaikan di bab berikutnya, hakikatnya berlangsung dalam sebuah kenyataan tertentu.

Pada kesempatan ini kami belum dapat secara langsung menampilkan paradigma pergerakan KOPRI saat ini. Sebuah rumusan paradigma yang berangkat dari kenyataan real perjalanan masyarakat dan bangsa Indonesia saat ini tidak mudah untuk disusun. Semoga rumusan tersebut, dapat disusun dikesempatan lain mungkin oleh kami atau generasi

KOPRI berikutnya yang mampu menangkap dan membahasakan kenyataan secara lebih jernih dan lugas. Menurut kami sketsa kenyataan yang kami paparkan dimuka itulah yang menjadi titik tolak sekaligus medan gerakan kita.

BAB II
SISTEM KADERISASI KOPRI

Bukan perkara mudah kita membahas dan menjawab system kaderisasi PMII. Masih menjadi isapan jempol dan menghayal keidelan kaderisasi PMII akan berjalan mulus, butuh waktu yang panjang dalam proses pengkaderan yang harus dilakukan oleh organisasi PMII.

Begitu juga dengan Korps PMII Puteri (KOPRI) yang masih berada didalam naungan PMII memiliki tanggung jawab tersendiri untuk merumuskan system kaderisasi.Bukan tanpa alasan ketika KOPRI turut andil dalam perumusan kaderisasi PMII khususnya KOPRI.Ada banyak faktor dan pembacaan ulang tentang makna kaderisasi sesungguhnya, membuat kader-kader perempuan PMII terdorong menginisiatif diri untuk merumuskan system kaderisasi tersendiri.

Selain itu, KOPRI sebagai badan semi otonom PMII secara idealnya KOPRI mampu menyusun dan mengelola system kaderisasi secara mandiri tanpa meninggalkan konsep pengkaderan PMII yang sudah ada.

A. Pandangan Umum Pengkaderan

Sejak berdiri 25 November 1967 di Semarang, KOPRI telah mengalami berbagai fase perubahan karena proses dialektika wacana dan pemikiran tentang feminism dan gender yang terjadi ditubuh KOPRI khususnya dan PMII pada umumnya. Proses dialektika itu diantaranya ditandai dengan dibubrkannya KOPRI di kongres Medan 1999 dan kemudian didirikan kembali diforum POKJANAS di Jakarta 2003. Dalam prosesnya, lahir perbedan-perbedaan gagasan, baik dalam penafsiran tentang gender dan feminism sebagai sebuah pengetahuan maupun dalam hal pengambilan kebijakan organisasi untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kader-kader perempuan PMII khususnya dan perempuan masyarakat luas.

Dalam proses perkembangan, Korps PMII Puteri (KOPRI) sebagai wadah kader perempuan PMII meyakini perannya sebagai *khalifatullah fil ardl*dan keberadaannya akan menjadi rahmat bagi segenap alam. Karenanya keberadaan KOPRI harus bisa dirasakan kemanfaatannya tidak hanya oleh kader-kader PMII baik laki-laki maupun perempuan tetapi juga bagi seluruh Umat yang ada dimuka bumi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penyempurnaan struktur KOPRI sebagai lembaga semi otonom PMII yang merupakan ruang pengembangan dan pembinan maslah perempuan seyogyanya dimaksimalkan untuk memperkuat kader perempuan PMII dalam nalar intelektual dan ideology organisasi, yaitu Aswaja prespektif perempuan.Ruang ini merupakan strategi memaksimalkan gerakan PMII.Karena gerakan-gerakan perempuan yang massif adalah juga bagian yang berpengaruh besar terhadap bentuk perubahan dalam perannya di

organisasi (internal), Negara, dan Agama. Telah dirumusan misi penting gerakan perempuan PMII yang terumus dalam institusi KOPRI, yaitu:

Ideologisasi

Struktur kolektif pengetahuan Membentuk masyarakat yang berkeadilan gender

Bagan II. Gerakan KOPRI
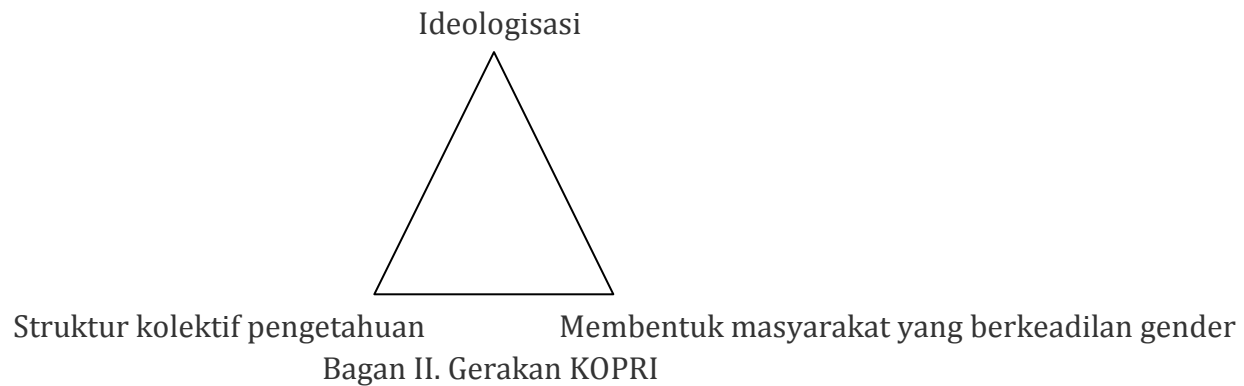
Untuk itu, penguatan materi tentang gender perspektif, menganalisa, pembacaan kritis, dan memiliki sensitifitas gender dalam menyikapi berbagai persoalan gender dan fenomenanya, produk-produk kebijakan pemerintah, dan KOPRI harus mampu memberikan alternatif-alternatif gagasan yang lebih mengakar dan relevan dengan kepentingan masyarakat khususnya perempuan. Pembacaan yang kritis adalah pembacaan yang multidimensi dan berkelanjutan.

B. Tiga Pilar Pengkaderan

Peningkatan kualitas kader dan pengkaderan KOPRI haruslah sesuai dengan pengkaderan yang sudah dilakukan di PMII sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Kemahasiswaan, Keislaman, dan Keindonesiaan. Upaya pengkaderan KOPRI tidak akan pernah lepas dari pemahamnnya atas kondisi objektif realita/kenyataan, kondisi masyarakat, dan lingkungan yang melingkupi dirinya disekitar kehidupannya.

Ketiga pilar ini harus menjadi spirit bergeraknya kaer-kader perempuan PMII dalam wujud gerakan yang otentik. Yang tak akan pernah lepas dari ketiga pilar diatas, dalam perwujudan dan menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni: sebagai mahasiswa, memiliki semangat juang dan gerakan, terampil dan bertanggungjawab akan intelektualitasnya. Keyakinan, pemahaman, pelaksanaan, dan penghayatannya atas ajaran islam, dan pengetahuan, wawasan, dan pembelaannya terhadap negara bangsa Indonesia.

BAB III
MATERI-MATERI PENGKADERAN

Tanpa menghilangkan pola kaderisasi yang sudah ada di PMII, perlu adanya penguatan institusi Korps PMII Puteri (KOPRI) sebagai organisasi yang berbadan semi otonom. Sama halnya dengan PMII, adanya kaderisasi formal, informal, dan non-formal. Dalam hal ini KOPRI berusaha mengkolaborasikan pola kaderisasi yang ada di PMII dengan kebutuhan kader-kader perempuan PMII yang ada di KOPRI.

A. Tentang Modul

Modul ini merupakan hasil dari aksi dan refleksi kader-kader perempuan PMII yang tergabung dalam Korp PMII Putri (KOPRI) sebagai acuan untuk melakukan kaderisasi formal yang ada di PMII. Dan sebagai wujud kesadaran kolektif akan pentingnya pembenahan kaderisasi KOPRI.

- Modul ini secara khusus ditujukan kepada seluruh Pengurus Cabang KOPRI Se-Jawa Barat, sebagai acuan untuk melaksanakan kaderisasi ditingkat basis masing-masing sesuai dengan konteks dan kebutuhan Cabang masing-masing.
- Modul ini berisi tentang outline-outline materi untuk peserta dan session plan untuk fasilitator
- Outline-outline materi sebagai bahan bacaan peserta untuk lebih memahami isi materi.
- Session plan merupakan rencana panduan untuk fasilitator disetiap sessi

B. Materi-materi Menurut Tiga Pilar Dasar

Jenjang	Kemahassiswaan	Keislaman	Keindonesiaan
SKK I	a. Masalah-masalah yang dihadapi perempuan b. Gender, seks, dan seksualitas c. Perempuan dan tanggungjawab social d. Kelembagaan KOPRI	1. Relasi agama, Negara & ketidaksetaraan perempuan 2. NDP Perspektif gender	1. Penyebab ketidaksetaraan perempuan
SKK II	1. Strategi pengembangan KOPRI 2. Pengorganisiran massa 3. Isu local	1. Islam dan pembebasan perempuan 2. Feminis Aswaja sebagai Manhaj Al-Harokah	1. Analisis social berpresfektif feminis 2. Analisis wacana berpresfektif feminis 3. Narasi gerakan perempuan dan KOPRI 4. Analisis kebijakan dan anggaran adil gender
SKK III	1. Membedah KOPRI perspektif ideology 2. Membedah KOPRI perspektif organisasi 3. Membedah KOPRI perspektif strategi dan gerakan 4. Membedah KOPRI perspektif kepemimpinan	1. Reinterpretasi gender	1. Strategi advokasi kebijakan public 2. Geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi gerakan perempuan 3. Analisis sturuktur patriarkhi 4. Tekhnik membangun jaringan dan public relation

BAB IV
KURIKULUM PENGKADERAN KOPRI

PENDAHULUAN

A. Tentang Sekolah Kader KOPRI (SKK)

"Jika menurutmu dirimu lebih utama daripada Maryam, 'Aisyah, atau Fatimah karena engkau laki-laki, sedangkan mereka perempuan maka orang yang mengatakan hal itu pantas disebut sebagai orang bodoh atau bahkan kafir (Ibnu Hazm Azh-Zhahiri)".

Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kebebasan berfikir dan berekspresi. Tapi kebebasan itu tidak sepenuhnya dirasakan oleh seluruh manusia. Kemiskinan merajalela, perang antar etnik, kerusuhan antar agama, kelaparan, pengangguran, dan masih banyak lagi problem yang dhadapi negeri ini. Dan yang lebih merasakan problem ini adalah mayoritas kaum perempuan. Perempuan menjadi objek terbesar yang didiskriminasi, marjinalisasi, stereotype, menjadi sasaran kekerasan, menjadi sasaran alat pemuas, beban ganda dalam urusan domestic merupan takdir perempuan. Dalam hal ini perempuan belum merdeka sebagai manusia yang utuh, perempuan hanya manusia kelas dua dari laki-laki.

Berangkat dari nilai tauhid yang ajarannya menggelorakan semangat *"Rahmatan Li al-'alamin"* membawa system berfikir yang rasional dan obyektif demi keadilan kemanusiaan. Kehadiran agama sebenarnya untuk menyelesaikan problem kemanusiaan. Menyuarakan keadilan (al-'adl), kebebasan (al-huriyyah), kesetaraan (al-musawwah) dan memanusiakan manusia (Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf).

Untuk itu Korp PMII Putri (KOPRI) sebagai wadah kader perempuan PMII menyadari perannya sebagai *Khalifatullah fi Al-ardl* dan keberadaannya akan menjadi rahmat bagi segenap alam. Karenanya keberadaan KOPRI harus mampu mengambil posisi dalam problem kaum perempuan saat ini.

Untuk itu, penguatan intelektual merupakan tugas bersama sebagai organisasi kader, tentunya untuk membangun kapasitas kader serta mendidik individu untuk memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi kepada organisasi demi terwujudnya kesejahteraan Indonesia. Sementara organisasi bagi seorang kader adalah ruang pendidikan, ruang belajar, dan ruang berlatih agar masing-masing individu telah siap ketika menghadapi arena nyata.

Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) merupakan organisasi kader, secara otomatis mempunyai tangung jawab dalam mencetak kader-kader yang berkualitas. Dan ini terkait dengan intelektualitas, kemampuan dan kreatifitas yang harus dimiliki kader-kader perempuan PMII, sesuai dengan yang dicita-citakan organisasi.

Sekolah Kader KOPRI (SKK) ini terdiri dari SKK I, SKK 2, dan SKK 3. SKK I lebih kepadaadalah salah satu bentuk kreatifitas kader untuk terus melakukan penguatan intelektual dan wawasan kader-kader perempuan. Sekolah ini dilakukan dengan konsep

dari, oleh dan untuk perempuan dan metode belajar yang partisipatif agar lebih menyenangkan dan sharing pengetahuan.

Program "sekolah" ini digunakan dalam rangka memberikan penyadaran bahwa kurikulum pendidikan setara jender yang diajarkan disekolah-sekolah formal, sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa perempuan. Dan disini suasana yang digunakan benar-benar suasana kelas disekolah tetapi dengan metode yang berbeda. Dan kami berharap sekolah ini tidak hanya dirasakan oleh kader-kader perempuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), tetapi juga dapat dirasakan dan diikuti oleh kader laki-laki. Karena bentuk penyadaran harus segera dilaksanakan bukan hanya untuk perempuan tetapi juga laki-laki.

Sekolah Kader KOPRI (SKK) ini akan dilakukan secara berjenjang, sama halnya yang dilakukan dikonsep kaderisasi PMII adanya, MAPABA, PKD, dan PKL. Begiitu juga KOPRI SKK I dilaksanakan untuk kader-kader yang telah mengikuti MAPABA dan resmi menjadi kader PMII. Dilanjutkan dengan SKK II merupakan pendidikan lanjutan bagi kader yang telah mengikuti Pendidikan Kader Dasar (PKD) dan telah mengikuti SKK I. selanjutnya SKK III dilaksanakan untuk kader yang telah mengikuti Pendidikan kader Lanjutan (PKL) dan SKK II.

Pendidikan berjenjang ini dimaksudkan agar pemahaman kader dan penguatan intelektual secara utuh dan tersistematiskan. Tidak terpotong-potong dan menjadi satu kesatuan pemahaman yang real kemasyarakat umumnya dan kader-ader PMII secara keseluruhan.

Pada akhirnya upaya kecil ini bertujuan agar sebagian kecil kaum perempuan yang sadar akan penindasan saat ini, tidak asyik dengan dunianya sendiri, dengan wacana-wacananya, dengan ide-idenya yang cemerlang, melainkan juga bertanggung jawab kepada ilmunya sesuai dengan tujuan PMII. Dan dapat menjawab keresahan-keresahan yang terjadi pada mayoritas perempuan lainnya.

B. TUJUAN

- Menciptakan kader yang Ulul Albab
- Penguatan intelektual dan kemandirian kader
- Mencetak kader yang memiliki loyalitas dan kesetiaan terhadap organisasi
- Membentuk kader yang militan dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai pergerakan
- Membentuk kader pelopor, pembaharu atau kreator

C. MODEL PENDEKATAN

Sekolah Kader Kopri (SKK) ini diselengarakan bagi mahasiswa yang telah menjadi anggota PMII dan telah mengikuti pendidikan formal yaitu MAPABA. Untuk itu secara umum dalam SKK ini menggunakan *pendekatan partisipatoris* yang menekankan keaktifan

peserta untuk mengungkapkan pengalaman, pengetahuan dan gagasannya sesuai materi yang diberikan.

Adapun setiap materi/sessi menekankan beberapa aspek yang diperlukan untuk memberikan pengertian dan pemahaman pengetahuan, yaitu:

a. *Problematik*, permulaan setiap pembelajaran diawali dengan penyajian persoalan yang dibahas atau dipecahkan. Oleh karena itu, dengan adanya problem semua yang dihadapi merupakan tantangan yang harus diselesaikan.
b. *Discovery atau Inquiry,* peserta didorong untuk dapat mengkaji dan menemukan hal-hal baru. Langkah ini mempunyai dua arah tujuan, yaitu pertama; mendorong peserta untuk lebih kreatif menyikapi sebuah permasalahan, dan kedua, memberikan kesadaran kepada peserta bahwa masih banyak sumber lain yang dapat dikaji dan penemuan-penemuan baru.
c. *Sharing,* yaitu berbagi pengalaman antar individu dalam memecahkan masalah.

KURIKULUM SEKOLAH KADER KOPRI I (SKK I)

A. KETENTUAN UMUM SKK I

1. Pengertian

   Sekolah Kader KOPRI I (SKK I) adalah fase orientasi kepada anggota-anggota perempuan PMII setelah mengikuti kaderisasi formal yaitu MAPABA. Dan dalam rangka penguatan intelektual kader-kader perempuan terhadap isu-isu gender dimasyarakat.

2. Tujuan

   Secara umum, anggota diharapkan menjadi anggota yang berkualitas MU'TAKID, yakni anggota yang memiliki loyalitas atau kesetiaan terhadap organisasi dan peka terhadap isu-isu gender dilingkungan sekitarnya.

   Secara khusus, setelah mengikuti SKK I anggota diharapan:

   - Memilki keyakinan bahwa PMII dan KOPRI merupakan organisasi kemahasiswaan yang tepat untuk pengembangan diri mahasiswa Islam.
   - Memiliki keyakinan bahwa PMII dan KOPRI adalah organisasi kemahasiswaan Islam yang paling tepat untuk memperjuangkan idealism dan memperjuangkan kaum mustadh'afin tanpa pandang bulu baik laki-laki maupun perempuan.
   - Mengikuti Ahlu al-Sunnah Wa al-Jama'ah (ASWAJA) sebagai dasar [rinsip pemahaman, pengamalan, dan penghayatan Islam di Indonesia.

3. Penyelenggara

   SKK I diselenggarakan oleh Pengurus Rayon atau Pengurus Komisariat dan telah mengikuti SKK I. penyelenggara SKK I melalui pengurus KOPRI mengkoordinasikan kepada Pengurus Rayon atau Pengurus Komisariat secara umum dan keseluruhan.

4. Peserta

   Peserta SKK I adalah anggota baru yang telah mengikuti dan dibai'at menjadi anggota PMII.

B. UNSUR PELAKSANA SKK I

Unsur pelaksana SKK I adalah tim atau individu yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan SKK I. sebagian unsure pelaksana SKK I ditugaskan untuk tetap berada didalam forum. Unsure pelaksana SKK I adalah sebagai berikut:

1. Panitia

   Panitia adalah tim yang dibentuk oleh penyelengga SKK I untuk melaksanakan SKK I. Dan panitia terdiri dari pengurus atau anggota yang telah mengikuti SKK I dengan tanda bukti berupa sertifikat. Susunan pokok panitia terdiri dari *Steering Committee (SC)* dan *Organizing Committee (OC)*. Secara detail susunan kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan pelaksanaan SKK I. tugas panitia SKK I adalah:

   a. Merancang konsep dan tekhnis pelaksanaan SKK I
   b. Bersama penyelenggara, menetapkan Narasumber, Fasilitator, dan Moderator

c. Mempersiapan sertifikat untuk peserta, Narasumber, Fasilitatir, dan Moderator
d. Mendata dan mendokumentasikan identitas peserta SKK I serta mengkoordinasikannya dengan Bidang Pengkaderan Rayon/Komisariat.
e. Menciptakan dan menjaga keberlangsungan serta kondusifitas SKK I.
f. Menyusun laporan kegiatan dan mempertanggungjawabkannya kepada penyelenggara SKK I.

3. Nara Sumber

Narasumber SKK I adalah orang yang diundang untuk memberian materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan SKK I dan tujuan materi yang disampaikan. Narasumber dalam SKK I mengikuti etentuan sebagai berikut:

a. Kader PMII atau KOPRI yang minimal telah mengikuti MAPABA dan SKK I, dipandang memiliki kompetensi dan maksimal duduk dijajaran Pengurus Cabang.
b. Kader PMII atau KOPRI yang telah paripurna (alumni) dan dipandang memiliki kompetensi.
c. Tokoh masyarakat, akademisi atau professional yang dipandang memiliki kompetensi.
d. Narasumber bertugas memberikan materi dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tujuan materi.

4. Fasilitator

Fasilitator SKK I adalah kader yang minimal telah mengikuti PKD, dinilai memiliki pengetahuan cukup atas materi-materi SKK I. Fasilitator SKK I berjumlah maksimal dua orang. Mereka bekerjasama dan dapat saling menggantikan dalam menjalankan tugas sebagai fasilitator. Tugas Fasilitator dalam SKK I adalah sebagai berikut:

a. Memantau perkembangan forum secara utuh (kondisi peserta, isi materi, peralatan materi, perlengkapan SKK I, dll)
b. Memberikan orientasi umum kepada peserta tentang arah yang dituju dari SKK I diawal kegiatan.
c. Mengarahkan peserta untuk meninjau kembali penangkapan dan pemahaman mereka terhadap seluruh materi SKK I diakhir kegiatan.
d. Membimbing peserta dalam pengambilan kesimpulan umum dari seluruh materi SKK I.
e. Mengantarkan dan mengakhiri sessi sebelum dan setelah materi.

5. Notulen

Notulen SKK I adalah anggota atau kader yang dinilai cakap dalam menyusun prosiding. Tugas notulen adalah sebagai berikut:

a. Mencatat pembicaraan yang terjadi dalam setiap sessi SKK I.
b. Menyusun dan merapikan catatan dalam bentuk prosiding yang bisa dibaca
c. Menyiapkan kebutuhan fasilitator yang berkaitan dengan tugasnya sebagai notulen.

6. Petugas Forum

   Petugas forum adalah anggota atau kader yang dinilai tanggap dan cekatan dalam merespon dan melayani kebutuuhan forum serta kebutuhan fasilitator sejauh menyangkut pelaksanaan SKK I. Petugas forum berjumlah maksimal tiga orang dan merupakan bagian dari panitia yang secara khusus ditugaskan untuk mengawal kebutuhan tekhnis forum.

C. KURIKULUM SKK I

- SESSI I PRA-KURIKULA

Sessi ini, dimulai dengan pemaparan tentang landasan, maksud, target, capaian, dan tujuan Sekolah Kader KOPRI (SKK) I. Agar peserta mampu memahami capaian yang hendak dicapai.

- SESSI II MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI PEREMPUAN

Sessi ini merupakan sessi kunci untuk keberhasilan sessi berikutnya. Dalam sessi ini akan didiskusikan masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan dalam kehidupan sehari-hari, teman terdekat, lingkungan, keluarga, sekolah bahkan kehidupan masyarakat yang lebih luas, berdasarkan realitas dan refleksi kehidupan masing-masing.

- SESSI III GENDER, SEKS DAN SEKSUALITAS

Dalam sessi ini, berlanjut dari sessi sebelumnya berdasarkan pengalaman dan realita akan didiskusikan konsep jender, seks dan seksualitas dan bentuk-bentuk ketertindasan seksualitas yang dialami perempuan.

- SESSI IV PENYEBAB KETIDAKSETARAAN PEREMPUAN

Sessi ini akan memaparkan sumber-sumber penyebab ketidaksetaraan perempuan. Konsep “konstruksi sosial” yang ada dimasyarakat dianggap sebagai akar penyebab ketidaksetaraan perempuan. Tapi, apa itu konstruksi sosial? Dalam sessi ini akan didiskusikan mengenai konsep patriarki, system ekonomi kapitalisme, dan system poliitik yang tidak demokratis akan mengkongkritkan pengertian tentang “konstruksi sosial”.

- SESSI V RELASI AGAMA, NEGARA DAN KETIDAKSETARAAN PEREMPUAN

Dalam pembahasan materi ini lebih kepada lingkup polemic pembebasan perempuan mengatasnamakan agama. Seperti, perda-perda syari’ah, UU anti pornografi, UU miras. Fakta ini membuktikan hubbungan agama dengan agenda politik yang merugikan perempuan

- SESSI VI NILAI DASAR PERGERAKAN (NDP) PERSPEKTIF GENDER

Dalam sessi ini, lebih kepada lingkup NDP PMII berperspektif gender. Memahami kemitrasejajaran sebagai khalifatu fi al-ardh dimuka bumi, dalam konteks tauhid, habluminallah, habluminannas, dan hablumina'alam.

- SESSI VII PEREMPUAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Dalam sessi ini, peserta diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan dalam kontes kekinian. Permasalahan perempuan bukan menjadi permasalahan personal yang harus diselesaikan secara sendiri-sendiri, tetapi menjadi persoalan bersama yang diperlukan penguatan kolektivitas.

- SESSI VIII KELEMBAGAAN KOPRI

Sessi ini akan memaparkan struktur, sejarah, tujuan, dan paradigma KOPRI sebagai penguatan institusi organisasi KOPRI. Termasuk didalamnya akan membahas AD/ART PMII yang membahas tentang kelembagaan KOPRI dan Peraturan Organisasi (PO) KOPRI.

- SESSI IX GENERAL REVIEW dan RTL

Sessi ini, meninjau ulang keseluruhan materi dan tingkat pemahaman peserta terhadap setiap materi, kesimpulan dari seluruh materi dan merancang kegiatan lanjutan pasca SKK I atau follow up SKK I.

- SESSI X EVALUASI

peserta dan seluruh unsur pelaksana SKK I mengetahui kekurangan dan kelebihan dari penyelenggaraan SKK I serta mengumpulkan catatan sebagai antisipasi bagi penyelenggaraan acara serupa dimasa yang akan datang.

D. FOLLOW UP SKK I

Follow up atau tindak lanjut SKK I adalah serangkai kegiatan yang diselengarakan untuk anggota perempuan PMII yang telah melaksanakan SKK I. rangkaian kegiatan tersebut berfungsi unttuk membekali dan mengarahkan dalam hal-hal pengembangan keorganisasian PMII umumnya dan KOPRI khususnya dan sebagai media bimbingan khusus bagi anggota kader-kader perempuan PMII.

1. Tujuan

   Follow up bertujuan untuk menjaga, memperdalam dan mengembangkan pemahaman anggota baru PMII atas materi-materi MAPABA dan SKK I. Selain itu follow up bertujuan untuk mengembangkan ketrampilankhusus anggota baru.
2. Penyelenggara

Penyelenggara follow up dikoordinasikan oleh bidang kaderisasi PMII bekerjasama dengan KOPRI dan peserta yang dibentuk dalam sessi general review dan RTL SKK I.

3. Kegiatan Follow Up

   Kegiatan follow up sebagai upaya pembekalan ketrampilan dasar berorganisasi dan ketrampilan tambahan sehingga diharapkan anggota benar-benar memiliki kemampuan lebih dibanding mahasiswa non-PMII. Dan yang paling penting terbentuk kesadaran tentang sensitif gender tanpa menghilangkan nilai-nilai PMII. Kegiatan follow up sebagai berikut:

   a. Pelatihan Leadership Perempuan

      Leadership skill merupakan salah satu elemen kunci yang harus dikuasai oleh semua kader perempuan PMII. Dan memahami hakikat kepemimpinan, bukan hanya struktur atau jabatan. Tetapi dirinya sendiri akan menjadi pemimpin bagi masyarakat.

   b. Kursus Epistemologi Gender

      Kursus epistemologi gender ini dimaksudkan untuk membekali anggota dengan struktur dasar pengetahuan, yang akan sangat berpengaruh pada pola pikir dan pola sikap. Dalam kursus ini lebih ditekankan kepada sejarah epistemologi gender dan filsafat secara umum yang dimaksudkan untuk mengetahui dan menempatkan filsafat sebagai sebuah produk peradaban yang terikat dengan historisitas tertentu.

   c. Pelatihan Publik Speaking

      Pelatihan publik speaking ini dimaksudkan agar anggota mampu menguasai dan mengelola kata dalam ruang yang lebih besar. Mengatur tutur kata dengan kesopanan, ramah tamah, dan bermakna.

KURIKULUM SEKOLAH KADER KOPRI II (SKK II)

A. KETENTUAN UMUM SKK II

1. Pengertian

   Sekolah Kader KOPRI II (SKK II) adalah fase penanaman nilai-nilai dan missi pergerakan serta pembentukan militansi kepada anggota untuk menjadi kader KOPRI. SKK II merupakan fase kedua dalam Pengkaderan Nonformal KOPRI dan di ikuti oleh kader perempuan yang telah menyelesaikan SKK I beserta pembelajaran 6 bulan dan PKD.

2. Tujuan

   Secara umum SKK II bertujuan membentuk kader MUJAHID yakni kader militan dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai pergerakan.

   Secara khusus, setelah mengikuti SKK I anggota diharapan:

   - Siap untuk memberikan diri bagi kepentingan pergerakan
   - Memiliki pengetahuan teoritik dan pengetahuan lapangan yang mumpuni
   - Memiliki kemampuan dan keterampilan berorganisasi.

3. Penyelenggara

   SKK II diselenggarakan oleh Pengurus Komisariat atau Pengurus Cabang dan telah mengikuti SKK II. penyelenggara SKK II melalui pengurus KOPRI mengkoordinasikan kepada Pengurus Rayon atau Pengurus Komisariat dan Pengurus Cabang secara umum dan keseluruhan.

4. Model Pendekatan

   Adapun pendekatan yang digunakan secara umum dalam SKK II adalah *pendekatan partisipatoris* yang menekankan keaktifan peserta untuk mengungkapkan pengalaman, pengetahuan, dan gagasannya sesuai materi yang diberikan. Menjadi catatan bahwa *Pendekatan Partisipatoris* digunakan dengan tetap menjaga konsistensi tujuan SKK II dan tujuan materi.

5. Peserta

   Peserta SKK II adalah kader peremuan PMII yang telah menyelesaikan SKK I dan telah mengikuti pendidikan formal PKD.

B. UNSUR PELAKSANA SKK II

Unsur pelaksana SKK II adalah tim atau individu yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan SKK II. sebagian unsur pelaksana SKK II ditugaskan untuk tetap berada didalam forum. Unsure pelaksana SKK II adalah sebagai berikut:

1. Panitia

   Panitia adalah tim yang dibentuk oleh penyelengga SKK I untuk melaksanakan SKK I. Dan panitia terdiri dari pengurus atau anggota yang telah mengikuti SKK I dengan tanda bukti berupa sertifikat. Susunan pokok panitia terdiri dari Steering Committee

(SC) dan Organizing Committee (OC). Secara detail susunan kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan pelaksanaan SKK II. tugas panitia SKK II adalah:

a. Merancang konsep dan tekhnis pelaksanaan SKK II
b. Bersama penyelenggara, menetapkan Narasumber, Fasilitator, dan Moderator
c. Mempersiapan sertifikat untuk peserta, Narasumber, Fasilitatir, dan Moderator
d. Mendata dan mendokumentasikan identitas peserta SKK II serta mengkoordinasikannya dengan Bidang Pengkaderan Rayon/Komisariat.
e. Menciptakan dan menjaga keberlangsungan serta kondusifitas SKK II.
f. Menyusun laporan kegiatan dan mempertanggungjawabkannya kepada penyelenggara SKK II.

2. Nara Sumber

Narasumber SKK II adalah orang yang diundang untuk memberian materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan SKK II dan tujuan materi yang disampaikan. Narasumber dalam SKK II mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Kader PMII atau KOPRI yang minimal telah mengikuti PKD dan SKK II, dipandang memiliki kompetensi dan maksimal duduk dijajaran Pengurus Cabang.

a. Kader PMII atau KOPRI yang telah paripurna (alumni) dan dipandang memiliki kompetensi.
b. Tokoh masyarakat, akademisi atau professional yang dipandang memiliki kompetensi.
c. Narasumber bertugas memberikan materi dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tujuan materi.

3. Pemandu Ahli

Pemandu ahli adalah kader atau orang yang ditunjuk untuk mendampingi peserta SKK II secara khusus dalam sessi studi banding keprofesian . Pemandu ahli sebaiknya telah memiliki pengalaman dan memahami seluk-beluk dunia profesi yang akan dikunjungi. Tugas-tugas pemandu ahli:

a. Mendampingi peserta melakukan studi banding.
b. Menjelaskan kepada peserta seluk beluk keprofes

4. Kader yang minimal telah mengikuti SKK II, dinilai memiliki pengetahuan cukup atas materi-materi SKK II. Fasilitator SKK II berjumlah maksimal dua orang. Mereka bekerjasama dan dapat saling menggantikan dalam menjalankan tugas sebagai fasilitator. Tugas Fasilitator dalam SKK II adalah sebagai berikut:

   1. Memantau perkembangan forum secara utuh (kondisi peserta, isi materi, peralatan materi, perlengkapan SKK II, dll)
   2. Memberikan orientasi umum kepada peserta tentang arah yang dituju dari SKK II diawal kegiatan.
   3. Mengarahkan peserta untuk meninjau kembali penangkapan dan pemahaman mereka terhadap seluruh materi SKK II diakhir kegiatan.

4. Membimbing peserta dalam pengambilan kesimpulan umum dari seluruh materi SKK II.
5. Mengantarkan dan mengakhiri sessi sebelum dan setelah materi.

5. Notulen

   Notulen SKK II adalah anggota atau kader yang dinilai cakap dalam menyusun prosiding. Tugas notulen adalah sebagai berikut:
   1. Mencatat pembicaraan yang terjadi dalam setiap sessi SKK II.
   2. Menyusun dan merapikan catatan dalam bentuk prosiding yang bisa dibaca
   3. Menyiapkan kebutuhan fasilitator yang berkaitan dengan tugasnya sebagai notulen.

6. Petugas Forum

   Petugas forum adalah anggota atau kader yang dinilai tanggap dan cekatan dalam merespon dan melayani kebutuuhan forum serta kebutuhan fasilitator sejauh menyangkut pelaksanaan SKK II. Petugas forum berjumlah maksimal tiga orang dan merupakan bagian dari panitia yang secara khusus ditugaskan untuk mengawal kebutuhan tekhnis forum.

C. KURIKULUM SKK II

- SESSI I PRA-KURIKULA

Dalam sessi ini diawali dengan memberikan pemahaman kepada peserta, peserta memahami tujuan SKK I dan mampu membaca posisi dan fungsinya sebagai kader perempuan PMII yang terorganisasi didalam KOPRI serta tersusunnya aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh unsur pelaksana SKK II.

- SESSI II ANALISIS SOSIAL BERPRESPEKTIF FEMINIS

Dalam sessi ini akan memaparkan teori-teori sosial konflik untuk memahami kenyataan masyarakat ditingkat lokal, nasional, dan lebih lagi global tentang ketimpangan sosial berdasarkan gender. Dan untuk memahami kerangka dan pola sosial dalam kenyataan masyarakat sebagai pengetahuan dasar bagi mungkinnya sebuah gerakan perempuan yang lebih massif.

- SESSI III ANALISIS WACANA BERPRESPEKTIF FEMINIS

Sessi ini akan lebih menekankan kepada fungsi strategi wacana sebagai misi pergerakan. Dan mengolah wacana sebagai bagian dari strategi dan taktik gerakan.

- SESSI IV NARASI GERAKAN PEREMPUAN DAN KOPRI

Dalam sessi ini lebih menekankan kepada epistemologi gerakan perempuan dan Ideologi-Politik-Organisasi KOPRI sebagai organisasi gerakan. Agar memperjelas arah gerak dan sikap politik KOPRI dalam kancah gerakan perempuan.

- SESSI IV ANALISIS KEBIJAKAN DAN ANGGARAN ADIL GENDER

Dalam pembahasan materi ini lebih kepada polemik pembebasan perempuan dari kebijakan dan anggaran kekuasaan. Fakta ini membuktikan, masih banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh aparatur negara yan tidak berpihak kepada permpuan bahkan merugikan perempuan. Termasuk anggaran yang tidak adil yang menyebabkan pemiskinan massal kepada masyarakat terlebih perempuan. Akses pendidikan, kesehatan yang mahal membuat kaum ibu tidak mampu mengakses itu semua.

- SESSI V STRATEGI PENGEMBANGAN KOPRI

Sessi ini, diharapkan peserta mampu memahami strategi pengembangan organisasi KOPRI dilingkungan kampus dan ditengah masyarakat. Kehadiran KOPRI harus mampu menjawab persoalan-persoalan ketidakadilan gender terhadap perempuan, dan membawa angin segar bagi orang-orang disekitarnya.

- SESSI VI ISLAM DAN PEMBEBASAN PEREMPUAN

Dalam pembahasan ini, peserta mengenal dan memahami istilah-istilah dasar dalam islam (Islam, Iman, Ihsan, Nabi, wahyu, Rasul, dll). Dan memahami misi-misi dasar Islam (ketauhidan, keadilan, persaudaraan, kesetaraan, kerahmatan, dan kemaslahatan). Agar peserta memahami konsep tauhid dalam islam sebagai basis transformasi menuju keadilan sosial dan mengaitkan prinsip keadilan gender dengan konsep tauhid, kenabian dan kekhilafahan.

- SESSI VII FEMINIS ASWAJA SEBAGAI MANHAJ AL-HARAKAH

Sessi ini lebih membahas spririt ASWAJA sebagai Manhaj Al-Fikr, spirit berfikir dialektis dan memiliki kerangka berfikir yang matang dalam melihat realita. Dan ghiroh berdialektika diterapkan menjadi Al-Harakah sebagai landasan bergerak, supaya spirit ASWAJA tidak hanya berkutat diwilayah ide tapi sudah mampu menjadi spirit materil yaitu bergerak.

- SESSI VIII PENGORGANISIRAN MASSA

Dalam pembahasan ini, peserta dibawa untuk memahami basis massa dan tekhnik mengorganisir. Pengorganisiran tidak hanya yang bersifat khusus, baik itu berdasarkan jenis kelamin, ras, suku, bahkan agama. Pembekalan ini perlu dimiliki oleh kader karena untuk menyiapkan kader terjun kemasyarakat yang merupakan medan strategis bagi kepentingan lain.

- SESSI IX ISU LOKAL

Setiap daerah bahkan wilayah memiliki karakter, budaya, dan ciri khas tersendiri, Indonesia yang memilik keberagaman sosial, budaya, bahasa, dan lain-lain yang

membuat isu ketidakadilan gender terhadap perempuan tidak bisa disama ratakan. Seperti: perempuan priangan kondisinya akan berbeda dengan perempuan pantura. Inilah tugas kader untuk mampu membaca dan menganalisis ekonomi politik daerah dan masyarakat dilingkungannya sendiri.

- SESSI X GENERAL REVIEW DAN RTL

Sessi ini, meninjau ulang keseluruhan materi dan tingkat pemahaman peserta terhadap setiap materi, kesimpulan dari seluruh materi dan merancang kegiatan lanjutan pasca SKK II atau follow up SKK II.

- SESSI XI EVALUASI

Peserta dan seluruh unsur pelaksana SKK II mengetahui kekurangan dan kelebihan dari penyelenggaraan SKK II serta mengumpulkan catatan sebagai antisipasi bagi penyelenggaraan acara serupa dimasa yang akan datang.

D. FOLLOW UP SKK II

Follow up atau tindak lanjut SKK II adalah serangkai kegiatan yang diselengarakan untuk kader perempuan PMII yang telah melaksanakan SKK II. rangkaian kegiatan tersebut berfungsi untuk membekali dan mengarahkan dalam hal-hal pengembangan keorganisasian PMII umumnya dan KOPRI khususnya dan sebagai media bimbingan khusus bagi anggota kader-kader perempuan PMII.

1. Tujuan

   Follow up bertujuan untuk menjaga, memperdalam dan mengembangkan pemahaman kader baru PMII atas materi-materi MAPABA dan SKK I. Selain itu follow up bertujuan untuk mengembangkan ketrampilan khusus bagi kader baru.

4. Penyelenggara

   Penyelenggara follow up dikoordinasikan oleh bidang kaderisasi PMII bekerjasama dengan KOPRI disetiap level kepengurusan dan peserta yang dibentuk dalam sessi general review dan RTL SKK II.

5. Kegiatan Follow Up

   Kegiatan follow up sebagai upaya pembekalan ketrampilan sehingga diharapkan kader perempuan PMII benar-benar memiliki kemampuan dalam mengembangkan diri dan lingkungannya. Dan yang paling penting terbentuk kesadaran tentang sensitif gender tanpa menghilangkan nilai-nilai PMII. Kegiatan follow up sebagai berikut:

   a. Pelatihan Kefasilitatoran

      Pelatihan ini menjadi wajib bagi peserta kader SKK II melihat KOPRI khususnya dan PMII umumnya saat ini membutuhkan banyak sekali instruktur untuk materi-materi pengkaderan. Melihat masih sangat minimnya kader perempuan

PMII yang masuk keruang publik PMII untuk mengisi materi. Selain itu, pelatihan ini sangat penting bagi kader perempuan PMII untuk bekal dalam berinteraksi dengan masyarakat dan organisasi yang lebih luas.

b. Kursus Politik

   Kursus politik ini diarahkan khusus untuk kader-kader perempuan PMII yang telah mengikuti SKK II, dan untuk mengasah kepekaan naluri relasi sosial kader ditengah masyarakat. Dalam status sebagai kader, seorang individu harus mulai dapat melihat posisi dan fungsi dirinya baik didalam organisasi maupun dilingkungan yang lebih luas tanpa melupakan kodratnya sebagai perempuan.

c. Pelatihan Advokasi

   Diharapkan kader-kader perempuan mampu untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Pelatihan ini dimaksudkan agar kader-kader perempuan peka terhadap kondisi dan realita yang memarginalkan, stereotype, mensubordinasi perempuan, dan lain-lain. Terlebih kader perempuan mampu mengadvokasi/melakukan pendampingan rakyat yang lebih luas.

KURIKULUM SEKOLAH KADER KOPRI III (SKK III)

A. KETENTUAN UMUM SKK III

1. Pengertian

   Sekolah Kader KOPRI III (SKK III) adalah fase pengkaderan untuk membangun dan memperkuat basis pengetahuan dan keterampilan yang akan menopang pilihan gerak kader KOPRI untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. SKK III merupakan Fase ketiga dalam proses pengkaderan nonformal PMII, dan SKK III untuk kader yang telah melaksanakan SKK II dan PKL.

2. Tujuan

   Secara umum SKK III bertujuan membentuk kader MUJTAHID yakni kategori kader pelopor , pembaharu atau kreator.

   Secara khusus, setelah mengikuti SKK III anggota diharapan:

   a. Mampu mengembangkan kualitas kepemimpinan pergerakan perempuan
   b. Mampu merancang strategi gerakan jangka pendek dan jangka panjang bagi misi KOPRI.
   c. Mampu mengidentifikasi ruang gerak dirinya saat ini dan masa yang akan datang
   d. Berkembang sebagai subyek yang percaya pada kapasitas individualitasnya sekaligus terikat pada pertaruhan kolektif

3. Penyelenggara

   SKK III diselenggarakan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Koordinator Cabang dan telah mengikuti SKK II dan pendidikan Kaderisasi Lanjut (PKL). Penyelenggara SKK III melalui bidang pengkaderan mengkoordinasi dan mengarahkan pelaksanaan SKK III secara umum.

4. Model Pendekatan

   Adapun pendekatan yang digunakan secara umum dalam SKK III adalah *pendekatan partisipatoris* yang menekankan keaktifan peserta untuk mengungkapkan pengalaman, pengetahuan, dan gagasannya sesuai materi yang diberikan. Sebagaimana dalam SKK II, *Pendekatan Partisipatoris* dalam SKK III digunakan dengan tetap dalam koridor tujuan pengkaderan, tujuan SKK III dan tujuan per sesi.

5. Peserta

   Peserta adalah kader KOPRI yang memenuhi syarat untuk mengikuti SKK III.

   Syarat-syarat umum peserta SKK III adalah sebagai berikut:

   a. Telah mengikuti SKK II, ditunjukan dengan foto copy sertifikat SKK II
   b. Telah mengikuti minimal satu pengkaderan Non formal lainnya, di tunjukan dengan foto copy sertifikat pelatihan/kursus.
   c. Dinilai teruji dalam Pengkaderan Informal dan di nilai aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PMII, di buktikan dengan surat rekomendasi dari Ketua

Kopri Komsariat (bila SKK III dilaksanakan Kopri PC) atau ketua kopri Cabang (bila SKK III diselenggarakan oleh kopri PKC)

d. Menyusun makalah dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan panitia.

Selain syarat-syarat di atas, bersama penyelenggara, panitia berhak menyusun syarat-syarat khusus peserta SKK III.

B. UNSUR PELAKSANA SKK III

Unsur pelaksana SKK III adalah tim atau individu yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan SKK III. sebagian unsur pelaksana SKK II ditugaskan untuk tetap berada didalam forum. Unsure pelaksana SKK III adalah sebagai berikut:

1. Panitia

   Panitia adalah tim yang dibentuk oleh penyelengga SKK III untuk melaksanakan SKK III. Dan panitia terdiri dari pengurus atau anggota yang telah mengikuti SKK III dengan tanda bukti berupa sertifikat. Susunan pokok panitia terdiri dari Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC). Secara detail susunan kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan pelaksanaan SKK III. tugas panitia SKK III adalah:

   a. Mematangkan konsep dan tekhnis pelaksanaan SKK III
   b. Bersama penyelenggara, menetapkan Narasumber, Fasilitator, dan Moderator
   c. Mempersiapan sertifikat untuk peserta, Narasumber, Fasilitatir, dan Moderator
   d. Mendata dan mendokumentasikan identitas peserta SKK III serta mengkoordinasikannya dengan Bidang Pengkaderan Rayon/Komisariat.
   e. Menciptakan dan menjaga keberlangsungan serta kondusifitas SKK III.
   f. Menyusun laporan kegiatan dan mempertanggungjawabkannya kepada penyelenggara SKK III.

2. Nara Sumber

   Narasumber SKK III adalah orang yang diundang untuk memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan SKK III dan tujuan materi yang disampaikan. Narasumber dalam SKK III mengikuti ketentuan sebagai berikut:

   a. Kader PMII atau KOPRI yang minimal telah mengikuti PKL dan SKK III, dipandang memiliki kompetensi dan maksimal duduk dijajaran Pengurus Cabang.
   b. Kader PMII atau KOPRI yang telah paripurna (alumni) dan dipandang memiliki kompetensi.
   c. Tokoh masyarakat, akademisi atau professional yang dipandang memiliki kompetensi.
   d. Narasumber bertugas memberikan materi dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tujuan materi.

3. Pemandu Ahli

   Pemandu ahli adalah kader atau orang yang ditunjuk untuk mendampingi peserta SKK III secara khusus dalam sessi studi banding keprofesian . Pemandu ahli sebaiknya telah

memiliki pengalaman dan memahami seluk-beluk dunia profesi yang akan dikunjungi. Tugas-tugas pemandu ahli:

a. Mendampingi peserta melakukan studi banding.
b. Menjelaskan kepada peserta seluk beluk keprofes

4. Kader yang minimal telah mengikuti SKK III, dinilai memiliki pengetahuan cukup atas materi-materi SKK III. Fasilitator SKK III berjumlah maksimal dua orang. Mereka bekerjasama dan dapat saling menggantikan dalam menjalankan tugas sebagai fasilitator. Tugas Fasilitator dalam SKK III adalah sebagai berikut:
   a. Memantau perkembangan forum secara utuh (kondisi peserta, isi materi, peralatan materi, perlengkapan SKK III, dll)
   b. Memberikan orientasi umum kepada peserta tentang arah yang dituju dari SKK III diawal kegiatan.
   c. Mengarahkan peserta untuk meninjau kembali penangkapan dan pemahaman mereka terhadap seluruh materi SKK III diakhir kegiatan.
   d. Membimbing peserta dalam pengambilan kesimpulan umum dari seluruh materi SKK III.
5. Notulen
   Notulen SKK III adalah anggota atau kader yang dinilai cakap dalam menyusun prosiding. Tugas notulen adalah sebagai berikut:
   a. Mencatat pembicaraan yang terjadi dalam setiap sessi SKK III.
   b. Menyusun dan merapikan catatan dalam bentuk prosiding yang bisa dibaca
   c. Menyiapkan kebutuhan fasilitator yang berkaitan dengan tugasnya sebagai notulen.
6. Petugas Forum
   Petugas forum adalah anggota atau kader yang dinilai tanggap dan cekatan dalam merespon dan melayani kebutuuhan forum serta kebutuhan fasilitator sejauh menyangkut pelaksanaan SKK III. Petugas forum berjumlah maksimal tiga orang dan merupakan bagian dari panitia yang secara khusus ditugaskan untuk mengawal kebutuhan tekhnis forum.

C. KURIKULUM SKK III

- SESSI I PRA-KURIKULA

Dalam sessi ini diawali dengan memberikan pemahaman kepada peserta, peserta memahami tujuan SKK III dan mampu membaca posisi dan fungsinya sebagai kader perempuan PMII yang terorganisasi didalam KOPRI serta tersusunnya aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh unsur pelaksana SKK III.

- SESSI II MEMBEDAH KOPRI PERSPEKTIF IDEOLOGI

Sessi ini, akan membahas Ideologi KOPRI yang terdapat pada tujuan organisasi, karakter gerakan, sikap hidup anggota/kader dan keberpihakan PMII dan KOPRI kepada kaum lemah. Dan peserta mampu merumuskan pengertian ideologi sebagaiman digunakan dan difahami oleh PMII umumnya dan KOPRI khususnya.

- SESSI III MEMBEDAH KOPRI PERSPEKTIF ORGANISASI

Pembahasan ini lebih kepada kelembagaan KOPRI yang menggunakan kelembagaan organisasi modern. Karena memang bertepatan degan berdirinya PMII pada awal abad 20. Ditandai dengan adanya sistem administrasi, pembagian tugas, hierarki otoritas, mekanisme pengambilan keputusan, dan badan semi otonom PMII.

- SESSI IV MEMBEDAH KOPRI PERSPEKTIF STRATEGI DAN GERAKAN

Sessi ini, akan membahas strategi gerakan dalam pengembangan organisasi gerakan. Dan peserta mampu memahami secara utuh strategi pergerakan KOPRI dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dan mampu membaca situasi gerakan-gerakan perempuan non-KOPRI atau PMII.

- SESSI V MEMBEDAH KOPRI PERSPEKTIF KEPEMIMPINAN

Dalam sessi ini peserta diharapkan mampu membedah kepemimpinan perempuan yang pas dan cocok untuk diterapkan dalam kepemimpinan perempuan KOPRI. Dan mampu mengurai kepemimpinan perempuan dari tingkat regional, nasional, bahkan global.

- SESSI VI ANALISIS STRUKTUR PATRIARKI

Sessi ini, akan membedah siapa sesungguhnya struktur patriarki itu sendiri. Dan peserta mampu mengkongkritkan “struktur patriarki” sebagai setruktur yang dibentuk oleh sistem ekonomi kapitalisme, dan sistem politik yang tidak demokratis.

- SESSI VII REINTERPRETASI GENDER

Pembahasan ini, akan menafsirkan ulang tentang gender berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits yang tidak ramah terhadap perempuan. Mulai dari memahami kaidah-kaidah fiqh, metode menginterpretasi ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits.

- SESSI VIII STRATEGI ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK

Dalam sessi ini, peserta akan dituntut untuk memetakan strategi dalam mengadvokasi kebijakan publik yang merugikan kepada perempuan. Dan menganalisa kebijakan publik yang sudah diterapkan disetiap daerah yang merugikan perempuan.

- SESSI IX GEOPOLITIK, GEOEKONOMI DAN GEOSTRATEGI GERAKAN PEREMPUAN

Dalam pembahasan kali ini, peserta mampu menganalisa keseragaman gerakan perempuan didunia, satu negara dengan negara lainnya berbeda. Feminisme sebagai sebuah *isme* dalam perjuangan gerakan perempuan juga mengalami interpretasi dan penekanan yang berbeda pula disetiap tempat dan daerah. Kondisi geografis suatu negara atau wilayah menjadi sangat penting dan menjadi pertimbangan pokok berbagai kebijakan, termasuk juga dalam merumuskan kebijakan keamanan nasional (national security) atau keamanan manusia (human security). Dan diharapkan peserta mampu memiliki pegangan untuk membaca peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi internasional serta nasional yang menuntut pensikan organisasi KOPRI.

- SESSI X TEKHNIK MEMBANGUN JARINGAN DAN PUBLIC RELATION

Sessi ini, akan dibahas public relation dari yang sifatnya emosional maupun struktural. Dan membangun jejaring sosial menjadi hubungan strategis dalam konteks pergerakan.

- SESSI XI GENERAL REVIEW DAN RTL

Sessi ini, meninjau ulang keseluruhan materi dan tingkat pemahaman peserta terhadap setiap materi, kesimpulan dari seluruh materi dan merancang kegiatan lanjutan pasca SKK III atau follow up SKK III.

- SESSI XII EVALUASI

Peserta dan seluruh unsur pelaksana SKK II mengetahui kekurangan dan kelebihan dari penyelenggaraan SKK III serta mengumpulkan catatan sebagai antisipasi bagi penyelenggaraan acara serupa dimasa yang akan datang.

D. FOLLOW UP SKK III

Follow up atau tindak lanjut SKK III adalah serangkai kegiatan yang diselengarakan untuk kader perempuan PMII yang telah melaksanakan SKK III. Rangkaian kegiatan tersebut berfungsi untuk membekali dan mengarahkan dalam hal-hal pengembangan keorganisasian PMII umumnya dan KOPRI khususnya dan sebagai media bimbingan khusus bagi anggota kader-kader perempuan PMII.

1. Tujuan

   Follow up bertujuan untuk menjaga, memperdalam dan mengembangkan pemahaman kader baru PMII atas materi-materi PKL dan SKK III. Selain itu follow up bertujuan untuk mengembangkan ketrampilan khusus bagi kader *Mujtahid*.

2. Penyelenggara
   Penyelenggara follow up dikoordinasikan oleh bidang kaderisasi PMII bekerjasama dengan KOPRI disetiap level kepengurusan dan peserta yang dibentuk dalam sessi general review dan RTL SKK III.
3. Kegiatan Follow Up
   Kegiatan follow up sebagai upaya pembekalan ketrampilan sehingga diharapkan kader perempuan PMII benar-benar memiliki kemampuan dalam mengembangkan diri dan lingkungannya. Dan yang paling penting terbentuk kesadaran tentang sensitif gender tanpa menghilangkan nilai-nilai PMII. Kegiatan follow up sebagai berikut:
   a. Pelatihan Gender Budgeting
      Pelatihan gender budgeting ini sangat diwajibkan kepada kader untuk memahami tentang kebijakan-kebijakan anggaran yang sensitif gender. KOPRI harus mampu membaca dan menganalisa anggaran-anggaran pemerintah dan pengalokasiannya. Termasuk menginventarisir masalah-masalah pembangunan yang dialami perempuan dalam berbagai aspek.
   b. Sekolah Demokrasi
      Sekolah demokrasi ini perlu dikuasai oleh kader perempuan PMII atau KOPRI. Agar kader memahami dengan seksama tentang demokrasi sesungguhnya. Sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang timpang merupakan kebijakan dan struktur sosial yang tidak demokratis. Dengan sekolah demokrasi ini kader diharapkan mampu mengembangkan potensi diri dalam bentuk yang lebih nyata.

RENCANA PENGELOLAAN KELAS (Session Plan)
SKK I

PRA KURIKULA

1. Pembukaan

Tujuan

1) Menjelaskan tujuan Sekolah Kader KOPRI (SKK), tujuan umum setiap sessi, tindak lanjut sekolah dan harapan-harapan dari penyelenggaraan sekolah.
2) Membuat kontrak belajar

Waktu **:** 20 Menit

Proses

1) Seluruh peserta dikumpulkan dalam satu ruangan
2) Panitia Sekolah Kader KOPRI menjelaskan poin-poin di bawah ini:
   - Tujuan Sekolah.
   - Metode, dan bagaimana semestinya peserta mengikuti sekolah ini.
   - Harapan-harapan dan rencana tindak lanjut pasca sekolah.
3) Pembuatan Kontrak Belajar
   - Panitia memandu pembuatan aturan-aturan belajar dan kelas yang disepakati bersama melalui power point presentation/alat bantu lainnya.
   - Pointer diskusi dan hasil kesepakatan akan diketik langsung dan ditayangkan melalui LCD/Power Point/alat bantu lainnya.
   - Hasil kesepakatan dapat dicetak untuk ditempel di ruang kelas dan dibagikan kepada peserta.

Alat & Bahan

1) Laptop
2) Power Poin Tujuan Sekolah, Metode, cara pengajaran.
3) Presentasi Power Poin tentang Kontrak Belajar.
4) Papan tulis/kertas plano
5) spidol besar

2. Perkenalan

Tujuan

1) Memperkenalkan diri dan membangun suasana akrab antara peserta dan panitia.
2) Mendorong peserta untuk berani mengekspresikan diri apa adanya dan seterbuka mungkin.

Waktu **:** 45 Menit/1 Jam

Metode

Permainan berdirilah jika …………

Proses

Petunjuk :

- Minta semua peserta untuk duduk membentuk lingkaran, lalu pemandu berdiri di tengah. Jalaskan kepada peserta bentuk permainannya, yaitu setiap pemandu mengucapkan kalimat , peserta mengucapkan kalimat, peserta diminta berdiri apabila kalimat itu sesuai dengan dirinya; misal : " Keluarga saya adalah keluarga pedagang….. "; " Saya seorang perempuan yang berani bicara di depan publik……. " dsb.
- Ucapkan kalimat – kalimat yang relevan dengan keadaan peserta (jangan sampai ada peserta yang tidak pernah berdiri), contoh – contoh kalimat misalnya :
  Saya adalah petugas lapangan
  Saya lahir di pedesaan
  Saya lahir di kota besar
  Saya memiliki hobby membaca, dsb
- Setelah selesai, minta seluruh peserta untuk memperkenalkan nama, asal, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya secara singkat.

Alat & Bahan

1) Laptop
2) File music untuk mengiringi proses

SESSI I MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI PEREMPUAN

Tujuan

1) Mengenal peserta lain dan panitia, mencairkan suasana agar terbangun atmosfer keakraban.
2) Menciptakan situasi yang mendukung munculnya keberanian dan kenyamanan peserta mengutarakan pendapat secara bebas, terbuka dan kritis.
3) Mampu menarik benang merah antara pengalaman dan masalah-masalah perempuan yang dialami tiap individu dengan pengalaman orang lain, dan perempuan di dalam masyarakat secara umum.
4) Memunculkan ketertarikan untuk mencari tahu lebih jauh lagi tentang apa, bagaimana, dan mengapa ketidakadilan terhadap perempuan terjadi.

Metode

Melalui sharing dan presentasi kelompok, permainan Adu panjang, besar, dan tinggi, dan permainan Tata Kata.

Waktu

Total 180 Menit

Proses

1) Sessi dibuka dengan mengajak peserta untuk duduk berkeliling, dan fasilitator berada di di tengah. Duduk lesehan tanpa menggunakan kursi lebih disarankan agar meminimalisir jarak dan rasa sungkan antar peserta.

Waktu 5 menit

2) Setelah selesai, Ajaklah semua peserta berdiri dan minta mereka membagi diri menjadi 2 – 3 kelompok.
3) Susunlah 3 kelompok itu secara berjajar. Lalu jelaskan bahwa 3 kelompok itu akan berlomba satu sama lainnya untuk masing-masing perintah dari wasitnya (berperan sebagai wasit adalah pemandu atau salah seorang peserta).
4) Setelah semua menyiapkan kelompoknya masing – masing, segera mulai permainan. Misalnya : Berlombalah untuk membuat barisan terpanjang tanpa terputus atau buatlah kelompok anda menjadi yang paling tinggi, buatlah lingkaran kelompok besar.

Catatan :

- Jangan memberi komentar bahwa mereka berhak menggunakan apa saja untuk menang dan menjadi kelompok yang tertinggi, terlebar dan terpanjang. Misalnya jika saat lomba ada peserta laki – laki yang sampai melepas kaos kaos untuk digunakan sebagai penyambung tangan supaya barisannya paling panjang. Biarkan saja , itu hak dia untuk secara kreatif memenangkan lomba.
- Jika selesai permainan, anda bisa menanyakan, misalnya ; "kenapa kelompok A bisa mancapai panjang hingga ke luar ruangan padahal anggotanya sama-sama 5 orang, itu untuk membuat peserta menikmati permainan dan melihat sesuatu yang tidak sekedar permainan".

Waktu 20 menit

5) Peserta dibagi ke dalam 4 kelompok (masing-masing duduk melingkar) untuk mulai melakukan sharing dan refleksi pengalaman hidup masing-masing ataupun yang ia saksikan di dalam lingkungan terdekat maupun di luar lingkungan terdekatnya.
6) Poin-poin yang penting untuk direfleksikan terdapat di dalam lembar Pokok-pokok materi pembahasan, antara lain:
    - Refleksi masalah yang dialami/disaksikan di lingkungan terdekat (keluarga, perkawanan, sekolah/Universitas, pergaulan, lingkungan tetangga, dsb)
    - Refleksi masalah yang dialami/disaksikan/diketahui/dipelajari di lingkungan yang lebih luas (tingkat kota/kabupaten, propinsi, Negara, internasional, dsb)
7) Untuk memudahkan peserta berdiskusi, fasilitator dapat memancing dengan pertanyaan-pertanyaan berikut:
    - Kamu di rumah ada berapa bersaudara? Ada berapa anak laki-laki/perempuan?
    - Apa makna ayah/ibu buat kamu? Mengapa? Bagaimana pengambilan keputusan di keluarga, melibatkan anak atau tidak? Anak perempuan juga dilibatkan?

- Apa tugas anak perempuan di rumah? Apa harapan orang tua pada anak perempuannya?
- Bagaimana peran anak perempuan di lingkungan tempat tinggal? Mengapa demikian?
- Apakah ada norma-norma khusus buat anak perempuan di lingkungan tempat tinggalmu? Apakah norma itu berlaku juga di keluargamu?
- Apa kegiatanmu selain kuliah? Jika tidak ada atau sedikit, mengapa? Jika ada, apakah kegiatan itu dilakukan bersama anak laki-laki? Jika tidak, mengapa?
- Apa bidang yang kau pelajari di kampus/sekolah? Mengapa kamu pilih bidang itu? Apa yang kamu bayangkan bisa kamu lakukan setelah selesai kuliah?

Setiap wakil kelompok mencatat dengan ringkas pandangan setiap anggota kelompok yang berbicara.

Waktu 60 Menit

8) Setelah beberapa peserta dari tiap kelompok menyampaikan pandangannya (tidak perlu seluruh ruang lingkup terbahas), mintalah wakil dari masing-masing kelompok untuk mencatat dan menyampaikan bagian mana dari pandangan-pandangan tersebut yang mereka anggap "masalah".

   Catatan: bila ada perbedaan pandangan terhadap apa yang disebut masalah, maka kedua pandangan harus dicatat, (misalnya satu orang menganggap hal A adalah masalah, sementara yang lain tidak).

   Waktu 20 Menit

9) Fasilitator harus mencatat:
   - Masalah-masalah perempuan muda yang ditangkap fasilitator dari penyampaian pandangan peserta.
   - Masalah-masalah yang belum disimpulkan peserta sebagai masalah. Namun ini tidak perlu disampaikan pada peserta. Cukup menjadi catatan fasilitator sebagai masukan bagi sesi-sesi berikutnya.

10) Minta salah satu peserta yang paling tidak aktif dari setiap kelompok untuk menuliskan kesimpulan kelompoknya dalam ukuran huruf yang besar pada kertas plano, sesaat sebelum presentasi. Kertas-kertas plano itu akan digunakan untuk presentasi oleh jubir kelompok, kemudian sepanjang acara, kertas plano akan tetap dibiarkan menempel di dalam ruangan pada bagian yang tidak mengganggu acara lainnya.

Waktu 15 Menit

11) Permainan Tata Kata
   - Sediakan potongan-potongan kertas karton/manila berukuran sekitar 10x30 cm persegi yang bertuliskan kata-kata yang relevan dengan topik, misalnya:

KEMISKINAN, PENDIDIKAN MAHAL, DISKRIMINASI, KECERDASAN, KARIR, EKONOMI, KELUARGA, PERNIKAHAN, dll— sebanyak-banyaknya.

- Dalam waktu 10 menit, minta masing-masing kelompok menempelkan potongan-potongan kertas itu ke papan kayu/gabus yang telah disediakan dalam satu rangkaian yang menggambarkan hubungan antara satu kata dengan kata yang lain. Semakin banyak kata yang disediakan akan semakin baik, karena kata-kata yang ada tidak boleh menggiring peserta dalam satu rumusan konsep tertentu.
- Penempelan kata-kata itu juga tidak harus dalam satu garis lurus. Tidak juga harus menggambarkan urutan tertentu. Yang terpenting peserta dapat menjelaskan apa hubungan satu kata dengan kata dikanan, atas atau bawahnya.

Waktu 20 menit

12) Presentasi Kelompok dan Diskusi Pleno
    - Secara bergiliran tiap kelompok akan mempresentasikan karyanya pada Permainan Tata Kata. Selanjutnya tiap kelompok dapat mendebat karya dan presentasi kelompok yang lain, secara bergiliran juga. Hal-hal yang dapat didiskusikan:
    - Perbedaan dalam penataan kata (yang menggambarkan perbedaan pandangan peserta mengenai hubungan satu kata dengan kata lain); Hubungan mana yang lebih tepat menurut peserta?
    - Kesimpulan mengenai apa saja yang dapat dikategorikan sebagai masalah perempuan.
    - Buka pula kesempatan bagi peserta untuk menambahkan kata-kata lain yang menurut mereka belum tersedia dan penting ditambahkan untuk memperjelas hubungan antar kata-kata yang ada. Tapi kata yang ditambahkan haruslah kata benda atau kata sifat, bukan sekadar kata sambung.

Alat & Bahan

1) Alat tulis untuk peserta
2) Kertas Plano
3) Spidol besar
4) Potongan-potongan karton/kertas manila yang sudah ditulisi kata-kata tertentu.
5) Papan untuk menempelkan potongan kertas
6) Selotip atau pines
7) Papan tulis atau LCD untuk menyorotkan poin-poin hasil diskusi kelompok

Catatan Fasilitator

1) Fasilitator diharapkan bersifat asertif (mendorong) dan memiliki wawasan mengenai realita hidup kaum perempuan, dampaknya bagi kehidupan perempuan di masa tua, juga bagi kehidupan masyarakat.
2) Fasilitator dapat menjelaskan bagaimana saling keterkaitan antar masalah dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberadaan masalah itu.

SESSI II GENDER, SEKS DAN SEKSUALITAS

Tujuan

1) Peserta mengetahui dan memahami pengertian dan perbedaan antara jender, seks, dan seksualitas.
2) Peserta mengenal dan memahami dampak negatif dari ketidaksetaraan jender.
3) Peserta mampu mengidentifikasikan realita ketidakadilan gender dalam masyarakat.
4) Peserta mengenal dan memahami tentang ketertindasan seksualitas yang dialami perempuan.

Metode

Melalui permainan "jika aku menjadi", permainan "kebutuhanku", diskusi kelompok dan presentasi powerpoint.

Durasi Materi

180 menit

Bahan Bacaan/Referensi

" Membongkar Heteronormativitas karya Kartini Network".

Proses

1) Perkenalan. Fasilitator akan memperkenalkan diri sekaligus mensosialisasikan tujuan pembelajaran materi Jender, Seks dan Seksualitas, agar peserta dapat memahami indikator keberhasilan fasilitator dalam menyampaikan materi.

Waktu5 menit

2) Mengenal pengertian Jender. Materi ini akan disampaikan melalui Permainan "Jika Aku Menjadi". Tujuan dari permainan ini adalah untuk mengetahui pemahaman awal peserta mengenai konsep Jender.
3) Peserta akan dipecah menjadi 3 kelompok (secara acak)
4) Fasilitator akan memberikan beberapa pertanyaan, antara lain :
   - Jika aku menjadi seorang ibu, apa yang harus aku lakukan
   - Jika aku menjadi seorang kakak perempuan, apa yang harus aku lakukan
   - Jika aku menjadi seorang isteri, apa yang harus aku lakukan
   - Jika aku menjadi seorang isteri pejabat, apa yang harus aku lakukan
   - Jika aku menjadi seorang perempuan, pekerjaan apa yang pantas untuk aku
   - Jika aku adalah anak perempuan, permainan apa yang pantas untuk aku
5) Setiap memberikan satu pertanyaan, fasilitator akan memberikan waktu beberapa detik kepada tiap kelompok untuk mendiskusikan jawabannya
6) Tiap kelompok diminta untuk menjawab pertanyaan fasilitator melalui ekspresi tubuh dan harus dipraktekkan oleh semua anggota kelompok. Misalnya mengekspresikan seorang ibu yang sedang mengasuh anak.

Waktu 5 Menit

7) Jawaban dari tiap kelompok akan dicatat oleh fasilitator (bisa dibantu oleh satu orang peserta dari tiap kelompok untuk mencatat jawaban dari masing-masing kelompoknya)
8) Tiap kelompok diminta untuk menyampaikan landasan jawaban mereka, dan diberi kebebasan untuk mengkritik jawaban kelompok lain.
9) Setelah permainan, tiap kelompok diminta untuk merefleksikan pesan jender yang dapat diambil dari permainan diatas sekaligus berdiskusi tentang dampak dari pengukuhan jender terhadap perempuan.

Waktu 15 menit

10) Sharing pendapat dan penjelasan powerpoint mengenai Seksualitas
    - Fasilitator akan memulai dengan metode sharing pendapat untuk mengetahu pemahaman awal peserta mengenai Seksualitas. Bisa dimulai dengan pertanyaan "apa definisi Sex" atau "apa definisi seksualitas yang dipahami"
    - Selanjutnya fasilitator akan menyampaikan materi tentang definisi Seks yang lebih komprehensif melalui power point.

Waktu 15 menit

11) Mengenal perbedaan Jender dan Seks. Materi ini akan disampaikan melalui permainan "Pilihan Tepat".
    - Fasilitator menempelkan 2 lembar kertas yang masing-masing bertuliskan "Jender" dan "Seks" dalam ukuran besar
    - Fasilitator akan menyampaikan beberapa pernyataan, antara lain :
        a. laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan
        b. pembagian peran dalam relasi hubungan lesbian
        c. perempuan harus patuh terhadap suami
        d. perempuan mempunyai kemampuan reproduksi
        e. suami menuntut isteri untuk hamil
        f. perempuan wajib tampil cantik dan menarik
        g. perempuan cantik adalah perempuan yang bertubuh langsing, tinggi dan berkulit putih
    - Peserta diminta untuk menjawab apakah pernyataan fasilitator termasuk kategori Jender atau Seks
    - Peserta menjawab dengan menempati posisi sesuai dengan tempelan kertas bertuliskan "Jender" dan "Seks" berukuran besar tadi.
    - Beberapa orang peserta diminta untuk memberikan alasan dan pendapat atas jawaban mereka.
    - Peserta dengan pilihan yang berbeda diminta untuk menyanggah atau mengkritik alasan atau pendapat peserta lain.

Waktu 10 menit

12) Menarik Kesimpulan.

- Fasilitator membimbing peserta untuk menarik kesimpulan secara keseluruhan dari materi "Jender dan Seksualitas"
- Fasilitator dapat mengacu pada tujuan pembelajaran dan pertanyaan dalam umpan balik untuk mengarahkan peserta menyimpulkan materi sesi ini.

Waktu 5 menit

13) Umpan Balik
    - Fasilitator membagikan kertas umpan balik kepada peserta dengan pertanyaan sebagai berikut
        a. Apa yang kamu ketahui tentang jender?
        b. Apakah sudah ada kesetaraan antara laki-laki dan
        c. Perempuan? Berikan contoh.
        d. Apa yang kamu ketahui tentang seksualitas?
        e. Bagaimana pendapatmu tentang homoseksualitas?
        f. Apa perbedaan antara seks dan jender? Berikan contoh.

Waktu 5 menit

Alat dan Bahan

1) Powerpoint dan kliping materi seksualitas.
2) 2 Kertas ukuran besar yang masing-masing bertuliskan "Jender" dan "Seksualitas"
3) Form umpan balik.
4) Kertas plano, papan tulis, LCD, powerpoint, Laptop, spidol, pena, beberapa kertas berukuran kecil, double tip.

Catatan untuk Fasilitator

1) Fasilitator menjalankan kelas berdasarkan rencana pengelolaan kelas materi "Jender dan Seksualitas".
2) Fasilitator menjalankan kelas sesuai dengan durasi waktu yang telah diberikan.
3) Fasilitator membimbing dengan ceria dan penuh semangat sehingga mampu menghidupkan suasana kelas.
4) Fasilitator sebaiknya melibatkan partisipasi semua peserta dalam proses kelas, misalnya memberikan porsi bicara yang sama dan setara
5) Kepada semua peserta.
6) Fasilitator tidak boleh memaksakan pendapat pribadinya kepada peserta.
7) Fasilitator sebaiknya mempelajari bahan bacaan dan referensi yang digunakan untuk menyusun materi sesi ini.

SESSI III PENYEBAB KETIDAKSETARAAN PEREMPUAN

Tujuan

1) Peserta memahami asal-usul ketidaksetaraan perempuan, melalui ilmu sejarah antropologi
2) Peserta dapat mengkategorikan actoraktor yang melanggengkan penyebab ketidaksetaraan perempuan
3) Peserta dapat menarik benang merah antar sumber masalah dengan dampak-dampak ketidak setaraan perempuan

Metode

Permainan

Durasi Materi

120 menit

Bahan Bacaan/Referensi

1) Anup shah, "Kepentingan Utama Globalisasi", Free Trade and Globalization, 03 September 2001, Anonim, Ekonomi Politik
2) Ni Luh Arjani, Feminisasi Kemiskinan dan Kultur Patriarkh.

Proses

1. Penayangan slide foto
   Fasilitator meminta peserta mencermati setiap gambar/foto yang ditampilkan pada layar viewer.
   Durasi 5 menit
2. Sharing Kelompok
   - Fasilitator meminta peserta menghitung dari 1 s.d 5 begitu seterusnya.
   - Peserta yang mendapat nomer sama segera berkumpul untuk membentuk satu kelompok.
   - Dalam kelompok, peserta diminta untuk mendiskusikan komentarkomentar serta opini dan bahkan analisis (bila ada) terhadap kelima foto/gambar yang ditayangkan tersebut.

   Durasi 15 menit
3. Presentasi Kelompok
   Fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil sharing kelompoknya. Fasilitator menuliskan tanggapan-tanggapan pada kertas/white board.
   Durasi 15 Menit
4. Eksplorasi Peserta
   Fasilitator menindaklanjuti tanggapan dengan melontarkan pertanyaanpertanyaan pada peserta terkait isu dalam ketiga foto/gambar tersebut.

- Tampilan foto prosesi wijik dalam adat pernikahan Jawa
    - ✓ Apa makna yang kalian ketahui dari prosesi membasuh kaki (wijik) dalam adat pernikahan budaya Jawa tersebut? Dan apa pendapatmu mengenai hal itu? (Sekedar *review* apabila sudah terlontar dalam presentasi).
    - ✓ Kenapa mempelai perempuan yang membasuh kaki? Kenapa tidak sebaliknya? Dan kenapa tidak bergantian?
    - ✓ Penggalian keywords (budaya, peran, relasi, ekspektasi, patriarki)
- Tampilan gambar iklan produk Ponds Flawless White
    - ✓ Kalau kamu produser iklan Ponds Flawless White, model dengan kualitas apa yang kamu cari untuk membintangi iklanmu?
    - ✓ Harus perempuan? Y/T? Kenapa?
    - ✓ Harus cantik? Y/T? Cantik itu yang seperti apa? (warna kulit, postur, jenis rambut, dsb)
    - ✓ Harus putih? Y/T?
    - ✓ Menurut siapa? Kepentingannya siapa?
    - ✓ Penggalian *keywords* (produsen/perusahan, media, kapitalisme, *beauty ideals*) Refleksi: *the idea of beauty from time to time* (tetap/berubah?)
- Tampilan foto kekerasan dan pemerkosaan oleh TNI di Papua & Jugun Ianfu
    - ✓ Bagaimanakah situasi perempuan dalam perang/konflik?
    - ✓ Hal-hal yang dihadapi perempuan termasuk resiko yang mungkin terjadi pada perempuan?
    - ✓ Refleksi sejarah kekerasan terhadap perempuan (PD I, PD IIJugun Ianfu, kasus perang Tim-Teng, konflik Atjeh, Kerusuhan 98 dsb);
    - ✓ Apa yang terjadi dan siapa dibalik kekerasan-kekerasan tersebut?
    - ✓ Menggali *keywords*: militer, negara, represifitas
- Tampilan foto perempuan-perempuan “perkasa”
    - ✓ Apa kira-kita yang ada dalam pikiran perempuan-perempuan itu?
    - ✓ Apa pengertian “perkasa” dalam gambar tersebut?
    - ✓ Bagaimana pendapat anda tentang label perkasa tersebut? Apa yang sebenarnya dimaksud?
    - ✓ Mengapa perempuan melakukan pekerjaan tersebut?
    - ✓ *Keywords*: beban ganda, kemiskinan, tugas-tugas domestik, dll

Durasi 15 menit

5. Identifikasi masalah

   Fasilitator bersama-sama dengan peserta mengidentifikasi permasalahan mendasar yang melatarbelakangi ketiga topik yang ada.

   Durasi 15 Menit

6. Penjelasan Singkat + Diskusi + Menarik Kesimpulan

Fasilitator menjelaskan secara singkat key concepts—patriarki, kapitalisme, kekerasan oleh negara, sebagai sumber persoalan ketidaksetaraan jender.
Durasi 20 Menit

Alat & Bahan

Foto
Laptop
LCD
White Board/kertas plano

Catatan Fasilitator

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.